

**PENYELESAIAN KASUS PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA OLEH DEBITUR KE PIHAK KETIGA SECARA MELAWAN
HUKUM DI PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG
KOTA SEMARANG
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

Humairo Khaerun Nida

NIM 1502056036

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H.
Sumbersari RT. 04 RW. 05 Kecamatan Ngampel
Kabupaten Kendal Kode Pos 51357

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Humairo Khaerun Nida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Humairo Khaerun Nida

NIM : 1502056036

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia
Oleh Debitur Ke Tangan Orang Lain Secara Melawan Hukum
di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut namanya dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kendal, 3 April 2020

Pembimbing I,



Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.
NIP. 19730821 200003 1 002

Saifudin, S.H.I., M.H
RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Banyutowo
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal 51319

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Humairo Khaerun Nida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Humairo Khaerun Nida

NIM : 1502056036

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **PENYELESAIAN KASUS PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA OLEH DEBITUR KE TANGAN ORANG LAIN SECARA
MELAWAN HUKUM DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
CABANG KOTA SEMARANG**

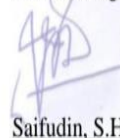
Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut namanya dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kendal, 9 April 2020

Pembimbing II



Saifudin, S.H.I., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Humairo Khaerun Nida
NIM : 1502056036
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT. Federal International Finance Cabang Kota

SemarangTelah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada 20April 2020, dan dinyatakan **LULUS** dan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Nur Hidayati Setyani,S.H.,M.H. (Penguji 1)
2. Dr. H. Ja'far Baehaqi,S.Ag.,M.H. (Penguji 2)
3. Novita Dewi Masyithoh,S.H.,M.H. (Penguji 3)
4. H. Moh. Arifin,M.Hum. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS* dengan nilai: 3,67 (B+).

Berita acara ini digunakan sebagai pengantisementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

BRILIYAN ERNA WATI

MOTTO:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

PERSEMBAHAAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Marsa'at dan Ibu Siti Harni yang senantiasa mendidik dan memenuhi kebutuhan saya dari kecil dengan penuh kasih sayang.
2. Kakak-kakak saya Ahmad Fahmi Riyadi dan Lisa Rufaeda yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya.
3. Keluarga saya Bapak Supardi, Ibu Siti Yuliani, Pakde Yono, dan Bude Khot yang sudah mendukung dan memberikan doa serta menerima keluhan saya.
4. Luthfi Trikusuma Aji yang selalu support dan menemani perjuangan menulis skripsi saya.
5. Indah Mahanani dan Dwi Muliani yang sudah menemani saya dari awal kuliah, menerima keluhan saya dan selalu mensupport saya.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Humairo Khaerun Nida

NIM : 1502056036

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Tangan Orang Lain Secara Melawan Hukum Di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiat maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 7 April 2020

Yang Menyatakan



Humairo Khaerun Nida

NIM. 15020506036

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan jaminan fidusia, kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan objek jaminan fidusia. Hukum jaminan fidusia tidak diperbolehkan dipindahtangankan secara melawan hukum oleh debitur. Tetapi, hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, dalam hal ini adalah pihak lembaga pembiayaan konsumen sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini dilihat dari judul penelitian, yaitu: **“Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Tangan Orang Lain Secara Melawan Hukum Di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang”**.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah proses pemindahtanganan objek jaminan fidusia secara melawan hukum? dan bagaimana penyelesaian pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur secara melawan hukum di PT. FIFGROUP ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal (normatif-empiris), yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di PT. FIFGROUP. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data yang diperoleh langsung di PT. FIFGROUP dan data sekunder berupa peraturan dan dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa praktik pemindahan yang dilakukan oleh debitur diperbolehkan asalkan mendapatkan izin tertulis dari PT. FIFGROUP. Akan tetapi kenyataannya tanpa perizinan, motif yang mendasari hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang menjadikan ketidaksanggupan melanjutkan angsuran. Tindakan PT. FIFGROUP dengan cara melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dibenarkan menurut Undang-Undang, hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, namun tanggal 6 Januari 2020 sesuai putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/ yang mana menjelaskan bahwa perusahaan leasing tidak dapat semerta-merta menarik Objek Jaminan Fidusia secara paksa atau sepihak. Perlu adanya kesadaran bagi debitur yang melakukan perjanjian konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih bertanggungjawab dan apabila tidak mampu membayar angsuran dan ingin dipindahtangankan hendaknya memberitahukan kepada PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang agar apabila terjadi eksekusi kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : Pemindahtanganan, Jaminan Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umat akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Tangan Orang Lain Secara Melawan Hukum Di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H dan Saifudin, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Kedua orangtua tercinta Bapak Marsa'at dan Ibu Siti Harni yang telah memberikan segala ilmu kehidupan untuk penulis
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Ali Imron, S. Ag., M. Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
6. Hj. Briliyan Ernawati, SH, M. Hum dan Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Kajur dan Sekjur Program Studi Ilmu Hukum

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam forum diskusi.
8. Viola Agnesia, S.E selaku Kepala Pendukung Pemasaran PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga Bapak Supardi, Ibu Siti Yuliani, Pakde Yono, Budhe Khot, Ahmad Fahmi Riyadi, dan Lisa Rufaeda yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini
10. Sodaraku Indah Mahanani terimakasih selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini
11. Luthfi Trikusuma Aji dan Dwi Muliani selalu bersedia menemani, mendengarkan keluhan penulis dari susahny menulis skripsi dan memberikan semangat serta kebahagiaan kepada penulis saat semangat mulai goyah. Semoga segala sesuatu yang diharapkan dilancarkan oleh Allah SWT.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2015 yang telah memberikan kebahagiaan dan semangat
13. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 6 April 2020
Penulis.

Humairo Khaerun Nida
NIM.15020506036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PEMBIAYAAN KONSUMEN, JAMINAN FIDUSIA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN PEMINDAHTANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR.....	21
A. Pembiayaan Konsumen	21
B. Jaminan Fidusia.....	22
1. Pengertian Fidusia	22
2. Objek Jaminan Fidusia	25

3. Subjek Jaminan Fidusia	28
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	31
5. Hapusnya Jaminan Fidusia	34
6. Eksekusi Jaminan Fidusia	36
C. Perbuatan Melawan Hukum.....	41
1. Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum.....	41
2. Tuntutan Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum.....	43
D. Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur	43
 BAB III PRAKTIK PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KE TANGAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL..... 50	
A. Gambaran PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang....	50
1. Profil PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang	50
2. Visi, Misi, dan Tujuan PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang.....	52
3. Produk-produk PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang.....	53
B. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang	56
C. Praktik Pemindahtanganan Jaminan Fidusia oleh Debitur secara Melawan Hukum Di PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang	61
 BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PEMINDHTANGANAN OBJEKJAMINAN FIDUSIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL 68	
A. Problem Penyelesaian Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Melawan Hukum	68
B. Bentuk Pertanggungjawaban Debitur melakukan Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia secara Melawan Hukum	79
 BAB V PENUTUP 85	

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya	11
Gambar 3.1	Contoh Hasil informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	58
Tabel 3.1	Data Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Ke Tangan Orang Lain Oleh Debitur Di Tahun 2017	63
Tabel 3.2	Data Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Ke Tangan Orang Lain Oleh Debitur Di Tahun 2018	63
Tabel 3.3	Data Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Ke Tangan Orang Lain Oleh Debitur Di Tahun 2019	63
Tabel 4.1	Ketentuan Undang-Undang dan Implikasi Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Konsumen	102
Lampiran 2 : Hasil Wawancara Bersama Ibu Viola Agnesia (Kepala Pendukung Pemasaran di PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang).....	107
Lampiran 3 : Hasil Wawancara Bersama Bapak ProboSelaku Perwakilan dari Departemen LitigasiPT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang ...	111
Lampiran 4 : Hasil Wawancara Bersama Bapak Alvian Akbar Selaku DebiturPT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang	113
Lampiran 5 : Hasil Wawancara Bersama Ibu Tri Widya Selaku Debitur PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang	115
Lampiran 6 : Hasil Wawancara Bersama Bapak A. Muntaha Selaku Debitur PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang	116
Lampiran 7 : Hasil Wawancara Bersama Bapak Salamun Ridwan Selaku Debitur PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang.....	117
Lampiran 8 : Hasil Wawancara Bersama Bapak Edi Susanto Selaku Debitur PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang	118
Lampiran 9 : Foto Wawancara Bersama Ibu Viola Agnesia dan Bapak Probo	119
Lampiran 10: Foto Wawancara Bersama Para Debitur Debitur PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang.....	120
Lampiran 11: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	122
Lampiran 12: Biodata Diri	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi saat ini, salah satu kegiatan usaha yang sangat pesat dikalangan masyarakat yaitu pembiayaan konsumen. Konsumen dengan mudah saat ini bisa mendapatkan barang yang diperlukan atau diinginkan dengan cara kredit hingga waktu tertentu untuk membantu konsumen menaikkan taraf hidupnya.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk membeli produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah, melainkan konsumen akan menerima barang yang diinginkan.¹

Dengan adanya pembiayaan konsumen masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam memberi barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10% sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.² Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil.³ Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan apabila ada seseorang yang menginginkan barang-barang konsumen seperti mobil, sepeda motor, televisi, lemari es, dan lain

¹ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Buku Pintar, 2012, hlm. 80.

² D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju 2015, hlm.6.

³*Ibid*, hlm. 10.

sebagainya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk membayar secara tunai barang-barang tersebut, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen.

Setiap pembiayaan yang diberikan pada konsumen pasti didahului suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian dalam lembaga pembiayaan inilah yang dinamakan dengan perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit.

Dalam perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan.⁴ Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitur). Hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur).

Jaminan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Jaminan juga dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang telah ditentukan dalam KUHPer maupun yang ditetapkan oleh yurisprudensi.⁵

Jaminan berfungsi sebagai sarana perlindungan untuk memberikan kepastian terhadap pihak kreditur apabila pihak debitur tidak dapat

⁴ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm.5.

⁵ H Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, Cetakan ke-2, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 31.

memenuhi atau lalai memenuhi kewajibannya. Jaminan terdiri dari jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promisary notes*) dari konsumen.⁶

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Pada awalnya, ketentuan hukum tentang jaminan fidusia di Indonesia hanya berdasarkan pada jurisprudensi saja. Namun mengingat lembaga jaminan fidusia semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.⁷ Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur. Kewajiban pendaftaran

⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 97.

⁷<https://www.kumham-jogja.info/pelayanan-publik/pelayanan-hukum-umum/fidusia>. diakses 16 Oktober 2019.

jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.⁸

Sejak diberlakukannya UUJF, dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur mengalami kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, dimana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur.

Salah satu dari beberapa lembaga pembiayaan konsumen yang sering digunakan sebagian masyarakat Indonesia ialah PT. Federal International Finance atau biasa disebut PT. FIFGROUP. Didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan merubah nama menjadi PT. FIFGROUP Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis fee, Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan

⁸ Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 10.

akad berdasarkan prinsip syariah dan Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.⁹

Kantor cabang PT. FIFGROUP yang berada di Kota Semarang merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang telah membantu memberikan jasa pembiayaan kepada banyak masyarakat di kota Semarang dan sekitarnya. Kantor cabang PT. FIFGROUP yang berada di kota Semarang, lebih tepatnya bertempat di Jalan Pamularsih No. 71, Bongsari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148.

Pembiayaan konsumen pada PT. FIF GROUP ini menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal sepeda motor) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang mempunyai barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.¹⁰

Dalam perjanjian jaminan fidusia kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan objek jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan sepeda motor tersebut sesuai dengan fungsinya, walaupun kendaraan sepeda motor dalam penguasaan debitur, debitur harus memelihara objek jaminan fidusia (kendaraan sepeda motor) sebaik-baiknya. Hukum jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan sepeda motor tidak diperbolehkan dipindahtangankan secara melawan hukum oleh debitur, yang dimaksud bahwa debitur tidak diperbolehkan mengalihkan sepeda motor, menggadaikan sepeda motor atau menyewakan sepeda motor yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain. Tetapi, hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat

⁹<https://www.fifgroup.co.id>.

¹⁰Dokumen prospectus PT. Federal International Finance Tahun 2018.

persetujuan dari kreditur, dalam hal ini adalah pihak lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT. FIFGROUP Cabang Semarang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹¹

Dalam proses perjanjian fidusia memiliki resiko yang tinggi dikarenakan dalam perjanjian ini benda yang dijadikan objek jaminan fidusia kekuasaannya tetap berada di tangan debitur dalam hal tersebut penyerahan benda tanpa penyerahan fisik dari benda tersebut. Pada tahun 2017 – 2019 data yang diperoleh dari PT. FIFGROUP terdapat beberapa kasus melawan hukum yang dilakukan debitur, yaitu debitur memindahtangankan objek jaminan fidusia ke tangan orang lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Salah satu contoh kasus melawan hukum yang dilakukan debitur dengan jaminan BPKB Honda Vario Bekas dengan membayar uang muka Rp. 2.000.000,- dan dibayar oleh PT. FIFGROUP sebesar Rp. 15.560.000. Atas kesepakatan itu semestinya debitur membayar kredit dengan cara mengangsur selama 35 bulan sebesar Rp. 550.000,- setiap bulan. Rupanya debitur memindahtangankan dengan cara dijual sepeda motor tersebut kepada oranglain tanpa persetujuan dari PT. FIFGROUP.¹²

Kasus lain yang terjadi di PT. FIFGROUP terdapat beberapa debitur yang menggadaikan objek jaminan fidusi ke orang lain tanpa sepengetahuan dari kreditur, yang seharusnya jika debitur akan memindahtangankan objek jaminan fidusia harus mendapat persetujuan dari kreditur.¹³

¹¹Lihat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

¹²Hasil wawancara dengan pihak PT. Federal International Finance yang diwakili oleh bapak Arya Pranandita selaku Branch Manager di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang.

¹³Hasil wawancara dengan pihak PT. Federal International Finance yang diwakili oleh bapak Arya Pranandita selaku Branch Manager di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang.

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi fidusia. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan tindakan pengalihan objek jaminan fidusia yang melawan hukum.

Dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia hampir semua lembaga keuangan baik mikro maupun makro mengalami pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, seperti halnya PT. FIFGroup. Penyebab debitur pemindahtanganan benda jaminan ialah membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, dan ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Debitur yang masih lancar dalam mengangsur kreditnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun sebaliknya, apabila debitur tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet, maka itu akan menjadi masalah baik debitur maupun kreditur.

Pengalihan benda jaminan yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain membuat kerugian bagi PT. FIFGROUP, karena benda jaminan tersebut dialihkan dengan cara dijual, digadaikan, atau disewakan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur, sehingga pihak kreditur tidak bisa melakukan eksekusi benda jaminan tersebut jika terjadi kredit macet, selain itu juga pihak kreditur juga mengalami kesulitan harus mencari sendiri benda yang dijaminan guna melakukan eksekusi.¹⁴

¹⁴Hasil wawancara dengan pihak PT. Federal International Finance yang diwakili oleh bapak Arya Pranandita selaku Branch Manager di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai upaya dari pihak pemberi kredit dalam menyelesaikan permasalahan pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur, dengan judul skripsi yaitu **“Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Tangan Orang Lain Secara Melawan Hukum Di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas sekiranya perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur ketangan orang lain secara melawan hukum yang terjadi di PT. Federal International Finance ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur ketangan orang lain secara melawan hukum yang terjadi di PT. Federal International Finance ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur ketangan orang lain secara melawan hukum yang terjadi di PT. FIFGROUP cabang Kota Semarang.
 - b. Untuk menjelaskan penyelesaian dalam kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur ketangan orang lain secara melawan hukum yang terjadi di PT. FIFGROUP cabang Kota Semarang.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau secara praktis maupun secara teoritis diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan penyelesaian kredit terhadap jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama mengenai jaminan kredit menggunakan jaminan fidusia dan agar masyarakat lebih memahami perjanjian kredit yang dilakukan, agar tercipta itikad baik bagi kedua belah pihak dan meminimalisir permasalahan yang muncul di masa yang akan datang.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mendukung penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia sesuai UUJF.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai problematika penyelesaian kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur ketangan orang lain sudah beberapa kali dibahas oleh beberapa orang didalam penelitiannya. Beberapa penelitian yang hampir sama dengan kajian yang akan diteliti diantaranya ialah:

- a) Penelitian Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono,¹⁵ dalam jurnal *Diponegoro Law*, dengan judul “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet(Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis”. Membahas tentang prosedur penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan

¹⁵ Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet(Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridi”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, 2017, diakses dari <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

menurut perundang-undangan, serta untuk mengetahui apakah perusahaan pembiayaan dalam praktik penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi di lapangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Penelitian Muhammad Rio Ervandra Putra,¹⁶ yang berjudul, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta”. Membahas mengenai membahas kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian yang digunakan serta hambatan yang dialami.
- c) Penelitian Ariyanto,¹⁷ yang berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Semarang”. Membahas mengenai apakah sudah sesuai yang dilakukan perusahaan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Jayapura sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dalam hal cara eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d) Penelitian Ali Maskur Faturrahman,¹⁸ yang berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dan Dampaknya Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dan

¹⁶ Muhammad Rio Ervandra Putra, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta”, *Jurnal Privat Law*, Volume v, Nomor 1, 2017, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw>.

¹⁷ Ariyanto, “Eksekusi Jaminan Fidusia “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Semarang”, *Jurnal Legal Pluralism*, Volume 3, Nomor 1, 2013, diakses di jurnal.uniyap.ac.id.

¹⁸ Ali Maskur Faturrahman, “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dan Dampaknya Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dan Pembiayaan Konsumen Di BPR Bhumikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta, diakses dari digilib.uin-suka.ac.id.

Pembiayaan Konsumen Di BPR Bhunikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera”. Didalam skripsi tersebut berfokuskan pada alternative-alternatif penyelesaian yang diterapkan oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan terkait masalah kredit macet yang diakibatkan pengalihan objek dan dampaknya bagi pihak ketiga.

- e) Penelitian RM. Leonard Charter Wahyu Wibowo,¹⁹ dengan judul, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar ”. Dalam tesis pembahasaannya mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor PT. Adira Finance di Kota Makassar serta pola penyelesaiannya.

Berikut ini perbedaan dan persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini :

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya

Telaah Pustaka	Persamaan	Perbedaan
Penelitian Shavira Ramadhanneswari dkk, dengan judul “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet(Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek yang dikaji sama adalah Jaminan Fidusia. • Jenis penelitian sama Yuridis empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitan penulis adalah Kota Semarang sedangkan Shavira ddk di leasing ACC Finance di Surabaya. • Fokus penelitian Penulis adalah penyelesaian kasus

¹⁹ RM. Leonard Charter Wahyu Wibowo, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”, Tesis, Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010, diakses dari eprints.undip.ac.id.

Ditinjau Dari Aspek Yuridis”		<p>objek jaminan yang sudah dipindahtangankan oleh debitur sedangkan Shavira ddk, lebih fokus pada pembiayaan kredit macet dan hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaiannya</p>
<p>Penelitian Muhammad Rio Ervandra Putra, yang berjudul, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian sama, mengenai penyelesaian kredit dalam perjanjian pembiayaan konsumen . 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian Muhammad Rio Ervand Putra adalah empiris sedangkan penulis adalah yuridis empiris (<i>Fiel Reseach</i>) • Penelitian penulis memiliki lokasi di PT FIF Kota Semarang, berbeda dengan penelitian Muhamad Rio di PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta. • Penelitian penulis hanya membahas

		<p>pada penyelesaian kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia sedangkan penelitian Muhamad Rio lebih terhadap faktor terjadinya wanprestasi serta hambatannya.</p>
<p>Penelitian Ariyanto, yang berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Semarang”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek penelitian sama, yakni Jaminan Fidusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian penulis menitikberatkan pada penyelesaian kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia sedangkan penelitian Ariyanto membahas Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dalam hal cara eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia
<p>Penelitian Ali Maskur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek 	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian penulis

Faturrahman, yang berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dan Dampaknya Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dan Pembiayaan Konsumen Di BPR Bhunikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera”	penelitian sama, yaitu Objek Jaminan Fidusia.	adalah hanya focus terhadap satu perusahaan pembiayaan konsumen sedangkan penelitian Ali Maskur melakukan 2 lokasi penelitian dan dilakukan perbandingan dalam penyelesaiannya.
Penelitian RM. Leonard Charter Wahyu Wibowo dengan judul, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar ”	Obyek penelitian sama, yaitu Jaminan Fidusia.	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis memiliki fokus lokasi di PT. FIF Semarang sedangkan tesis RM Leonard memiliki lokasi di PT. Adira Finance Kota Makassar. • Adapun fokus Penelitian penulis berbeda, penulis memiliki fokus penelitian adalah penyelesaian kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur. sedangkan tesis

		Leonard berfokus terhadap eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet.
--	--	---

Beberapa karya diatas mempunyai kesamaan dalam beberapa *point* dengan tema yang diangkat oleh penulis. Namun yang menjadi pembeda dengan semua karya di atas ialah dalam objek penelitian. Selain itu lingkup kajian yang penulis angkat ialah upaya dari pihak pemberi kredit dalam menyelesaikan kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur ketangan orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian, urgensi permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah diatas berbeda dengan objek kajian yang dibahas oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki makna, seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Adapun definisi lain, menyebutkan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data.²⁰ Dalam membahas penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari permasalahan yang dikaji, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal (normatif-empiris), yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku dalam masyarakat. Menurut Salim HS, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm.194.

dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat aspek tingkat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau intansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, dan lain sebagainya.²¹ Penelitian ini mencoba mengungkapkan fakta-fakta lapangan yang terjadi didalam penyelesaian kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur ketangan oranglain di PT. FIFGroup Cabang Kota Semarang.

Pendekatan implementasi/penerapan hukumnya ialah pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat terhadap aspek tingkat kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau intansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, dan lain sebagainya.²²

2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan.²³ Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).²⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, yang dilengkapi dengan data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer disini ialah sumber data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 20-21.

²² Lexi. J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 3.

²³ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2006, hlm. 133.

²⁴ Sukistyowati Irianto, dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 132.

masalah yang menjadi pokok pembahasan, melalui wawancara dengan narasumber (tidak melalui perantara). Sumber data tersebut dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dapat berupa opini orang secara individu dan kelompok, hasil observasi dari suatu keadaan fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.²⁵ Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan pihak pegawai PT. FIFGROUP cabang Kota Semarang yang menangani penyelesaian terhadap kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur beserta debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian jaminan fidusia, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengambil dari data yang ada, kemudian data digali, ditemukan, dikompilasi, dan dianalisis, data akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a) Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷

²⁵ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Sidoharjo: CV. Mitra Media, 2003, hlm. 57.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 106

²⁷ Lexi. J. Moeleong, *Op.cit*, hlm. 186.

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pihak pegawai PT. FIFGROUP cabang Kota Semarang yang menangani penyelesaian terhadap kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur serta beberapa debitur yang melakukan tindakan melawan hukum dalam kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia.

b) Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan teknik ini, penyusun meneliti data-data yang diperoleh dari catatan, transkrip, buku surat, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema kemudian digabungkan menjadi satu-kesatuan sehingga menjadi hasil penelitian serta dokumen yang ada di tempat penelitian seperti foto dan surat-surat, selama melakukan penelitian di PT. FIFGROUP Cabang Semarang.

c) Studi Kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan (library research) berupa pengambilan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan literatur atau tulisan ilmiah, tesis, skripsi maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan pemindahtanganan objek jaminan fidusia. Selain itu juga dengan buku-buku yang berisi teori-teori yang dapat menunjang penelitian ini

4. Validitas Data

Menguji data primer dan sekunder dengan membandingkan antara data yang ada. Bertujuan untuk menguatkan data satu dengan yang lainnya, agar dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan data yang valid. Diharapkan dengan data yang valid dapat memperkuat hasil penelitian.

Dengan teknik tersebut penelitian dilakukan dengan membandingkan antara data-data yang diperoleh di PT. FIFGroup melalui wawancara dengan isi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan yang diteliti, seperti dokumen yang diperoleh dari PT. FIFGROUP. Diharapkan dengan data valid dapat memperkuat menjawab hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah.

Tahap analisis data, setelah seluruh data-data baik primer maupun sekunder telah diperoleh, maka saatnya untuk mengelaborasi keduanya menjadi sebuah data yang bersifat analitik, dalam melakukan analisa penulis menggunakan jenis deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis suatu kejadian yang berkaitan dengan data yang diperoleh. Penulis menggunakan jenis deskriptif analisis karena penulis akan menganalisis pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur secara melawan hukum berdasarkan data yang diperoleh di lapangan berupa data primer dikolaborasikan dengan data sekunder sehingga menghasilkan penelitian deskriptif.

Setelah semua data diperoleh, maka saatnya tahap pengelolaan data.

Dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Meninjau Kembali Data, meneliti kembali catatan pada saat mencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

- b. Identifikasi Data, yaitu sebuah tindakan analisa guna mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur ke pihak ketiga secara melawan hukum di PT. FIFGroup Cabang Kota Semarang.
- c. Klasifikasi Data, yaitu hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- d. Penyusunan Data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan dalam bentuk hasil penelitian deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan membagi kedalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBIAYAAN KONSUMEN, JAMINAN FIDUSIA, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bab ini membahas tentang Pembiayaan konsumen, Jaminan Fidusia, dan Perbuatan Melawan Hukum serta Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur.

BAB III : PRAKTEK PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KE TANGAN

ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum PT. FIFGROUP, mekanisme pelaksanaan pembiayaan konsumen serta praktik pemindahtanganan jaminan fidusia oleh debitur secara melawan hukum.

BAB IV : ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Bab ini menganalisis tentang penyelesaian pemindahtanganan objek jaminan fidusia dan bentuk pertanggungjawaban debitur dalam pemindahtanganan objek jaminan fidusia secara melawan hukum.

BAB V : PENUTUP

Penutup meliputi simpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PEMBIAYAAN KONSUMEN, JAMINAN FIDUSIA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN PEMINDAHTANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR

A. PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen. Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank.²⁸

Menurut A. Abdurahman pengertian pembiayaan konsumen ialah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.²⁹

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 *juncto* Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala konsumen.

Berdasarkan Abdulkadir Muhammad dan Murniati unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:³⁰

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), penyedia barang (pemasok).
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, kendaraan.

²⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 96.

²⁹ *Ibid*, hlm. 96.

³⁰ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 246.

- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pihak pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayain perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan adalah berupa pengakuan utang dari konsumen.

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan atau anggunan bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya.³¹

Fidusia memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia berarti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban melakukan perbuatan untuk kemanfaatan

³¹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 151

orang lain. Sebagai kata sifat, fidusia menunjukkan pengertian penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.³²

Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 UUJF disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia yaitu:³³

- 1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- 2) Dilakukan atas dasar kepercayaan
- 3) Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda

Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan dari pemiliknya kepada kreditur adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan jaminan. Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Adapun cara penyerahan dan pemindahan kebendaan fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium* yaitu suatu keadaan dimana benda tetap dikuasai si debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur.³⁴ Perlu diingat bahwa penyerahan dan pemindahan hak kepemilikan atas suatu kebendaan fidusia dimaksudkan sebagai agunan saja bagi pelunasan piutang kreditur jika debitur wanprestasi, tidak dimaksudkan untuk dinikmati atau dimiliki oleh kreditur.

³² Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara., *Disertasi*, Medan: PPs-USU, 2002, hlm . 40.

³³ Rahmadi Usman , *Op.Cit*, hlm. 152.

³⁴ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur Perikatan*, Jakarta: Galia Indonesia, 1984, hlm. 45

Bentuk penyerahan *constitutum possessorium* dikenal dalam praktik, sedang dalam ketentuan pasal 612 KUHPerdato dinyatakan bahwa penyerahan suatu benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata. Jelas KUHPerdato tidak mengenal penyerahan secara *constitutum possessorium*. Akan tetapi, penyerahan secara *constitutum possessorium* ini tetap dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki.³⁵

Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.³⁶ Asas ini tersirat dalam pasal 1338 KUHPer pada intinya menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan.

Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, menyebutkan orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, pada umumnya juga boleh mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III. Secara Historis kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi lima macam kebebasan, yaitu:³⁷

- a) kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak.
- b) kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak.
- c) kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak.
- d) kebebasan para pihak menentukan isi kontrak.
- e) kebebasan pada pihak menentukan cara penutupan kontrak.

Dengan adanya penyerahan “hak kepemilikan” atas jaminan fidusia ini, berarti kreditur akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur,

³⁵ *Ibid*, hlm 46

³⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 12

³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-XXXIII, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm. 128.

dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya “seolah-olah” dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia yang dimaksud, bila debitur wanprestasi atau melawan hukum. Dengan kata lain, selama debitur belum melunasi utangnya, selama itu pula kreditur mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya. Ini berarti bila utang debitur lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditur.³⁸

Dalam Pasal 1 angka 2 UUJF, unsur-unsur dari jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan
- 2) Kebendaan bergerak sebagai objeknya
- 3) Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia
- 4) Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan
- 5) Untuk pelunasan tertentu suatu utang tertentu
- 6) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

2. Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan pasal 2 UUJF, sepanjang perjanjian itu bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia, perjanjian tersebut tunduk pada dan mengikuti undang-undang yang berlaku. Suatu hubungan hukum yang mempunyai ciri-ciri fidusia yang disebutkan dalam UUJF, sekalipun tidak memakai judul fidusia. Karena dengan itu berarti bahwa UUJF Fidusia tidak harus berlaku untuk segala macam hubungan fidusia yang meliputi bidang yang luas, karena hubungan fidusia itu ada setiap kali ada seseorang yang secara teknis yuridis pemilik, tetapi secara sosial ekonomis hak itu dapat dianggap milik orang lain.³⁹

³⁸ Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 153

³⁹ *Ibid*, hlm 175

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, artinya harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusiaan. Kekuatan mengikat dari suatu kontrak adalah lahir ketika telah adanya kata sepakat, atau dikenal dengan asas konsensualitas, dimana para pihak yang berjanji telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian hukum. Menurut Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran menerima yang terdapat dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca menjadi tanggungjawabnya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁴⁰

Namun demikian pemberi dan penerima fidusia tidak dapat sekehendak hati memperjanjikan pemberian jaminan fidusia tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan untuk membebani suatu benda dengan jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Para pihak dapat saja secara tersendiri menyimpangi, sepanjang hal tersebut dibolehkan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sebelum adanya UUJF, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan itu benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagang, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, lahirlah Undang-Undang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu:⁴¹

- 1) Benda bergerak yang berwujud

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 29.

⁴¹ *Ibid*, hlm 176

- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud
- 3) Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan

Objek jaminan fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan⁴² dan hipotek⁴³, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut dapat dimiliki dan dialihkan, sehingga dengan demikian objek jaminan fidusia meliputi:⁴⁴

- 1) Benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- 2) Dapat atas benda berwujud
- 3) Dapat atas benda yang tidak berwujud, termasuk piutang
- 4) Dapat atas benda yang terdaftar
- 5) Dapat atas benda yang tidak terdaftar
- 6) Benda bergerak
- 7) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan
- 8) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotek

Objek jaminan fidusia bertalian dengan ruang lingkup berlakunya, ditafsirkan secara *argumentum acontratio*,⁴⁵ maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dirumuskan dalam pengertian yang luas, meliputi:⁴⁶

- 1) Benda bergerak yang berwujud
- 2) Benda bergerak tidak berwujud, termasuk piutang

⁴² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

⁴³ Menurut Pasal 1168 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

⁴⁴ Subekti, Op.cit, hlm 177

⁴⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 115. Pengertian *argumentum acontratio* adalah menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

⁴⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2002, hlm. 195

- 3) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- 4) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotek sebagaimana diatur dalam KUHPer dan KUHDagang

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak hanya benda yang sudah ada pada saat jaminan fidusia tersebut dilakukan, akan tetapi meliputi pula benda yang memperoleh kemudian, dapat diberikan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, sebab pengalihan hak kepemilikan tersebut dilaksanakan “sekarang dan untuk nantinya”.Ketentuan ini dipandang penting dari segi komersial.Hal ini menunjukkan bahwa UUJF menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwil benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang.

Selanjutnya mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang juga menjadi objek jaminan fidusia. Dengan demikian sepanjang tidak diperjanjikan lain, maka penjaminan fidusia tersebut meliputi pula:⁴⁷

- a. Hasil dari benda yang menjadi objek jamnan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- b. Klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan dan klaim asuransi ini merupakan hak Penerima Fidusia.

3. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.Menurut Pasal 1 Angka 5 UUJF yang menjadi pemberi fidusia bisa

⁴⁷ J. Satrio, *Janji-Janji Dalam Akta Hipotek Dan Hak Tanggungan*, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2002, hlm. 236-237.

orang perseorangan atau korporasi⁴⁸ pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari pengertian tersebut, berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ke tiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Bagi kita yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.⁴⁹

Berdasarkan *Sio Arrest* tanggal 22 Mei 1953, debitur tidak diperkenankan menyerahkan hak milik atas barang jaminan yang sama pada dua kreditur. Artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada kreditur yang pertama adalah sah, sedang yang dilakukan kepada kreditur yang kedua adalah batal. Dalam praktik keadaannya yang demikian menyulitkan kreditur. Kreditur dalam suatu perjanjian utang-piutang dalam jaminan fidusia dapat dikatakan tidak mungkin menyelidiki terlebih dahulu apakah debitur benar-benar pemilik, yaitu orang yang dapat bertindak bebas atas barang yang dijaminakan itu, terutama karena barang yang dijaminakan berupa barang bergerak. Kreditur dalam hal itu hanya dapat meminta kepada debitur untuk berjanji bahwa ia adalah benar-benar orang yang berhak untuk berbuat bebas atas barang yang dijaminakan itu.⁵⁰

Selaku peminjam pakai suatu barang, debitur secara umum berkewajiban memelihara barang jaminan selaku “bapak rumah yang baik”, artinya selaku seorang pemilik barang memelihara barangnya sendiri. Kadang-kadang kreditur tertentu meminta agar barang-barang yang dijaminakan debitur diasuransikan, atau mungkin pula kreditur yang mengasuransikan tetapi setoran asuransi tetap harus dibayar oleh debitur. Dapatlah dikatakan bahwa debitur berkewajiban menanggung

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 181. Yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa memiliki hak milik, sekalipun bukan badan hukum.

⁴⁹ Rachmandi Usman, *Op.cit*, hlm 185

⁵⁰ J. Satrio II, *Op.Cit*, hlm. 237.

semua biaya pengelolaan barang jaminan, kreditur hanya “terima bersih” saja. Kewajiban itu dapat kita maklumi, karena secara sosial ekonomi pihak debitur lah yang berkepentingan atas barang tersebut. Kreditur hanya berkepentingan atas pembayaran kembali apa yang telah diutangkan oleh debitur.⁵¹

Bentuk awal dari fidusia yang kita kenal sekarang ialah *fiducia cum creditore*.⁵² Penyerahan hak milik pada tersebut terjadi secara sempurna sehingga kreditur berkedudukan sebagai pemilik yang sempurna. Sebagai pemilik tentu saja ia bebas berbuat apapun terhadap barang yang dimilikinya, hanya saja berdasarkan kepercayaan berkewajiban mengembalikan hak milik atas barang tadi kepada debitur apabila pihak yang belakangan ini melunasi utangnya kepada kreditur.⁵³

Menurut Pitlo, Kleyn, Asser, van Oven mengatakan perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan, merupakan hak pemilik terbatas. Perjanjian ini hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik. Jika pemilik fidusia pailit, benda fidusia tidak termasuk ke dalam budel pailit. Kurator kepailitan tidak berhak menuntut benda hak fidusia dari kekuasaan pemberi fidusia. Benda fidusia hanya dapat dilelang dalam batas-batas sebagai benda jaminan untuk melunasi utang pemberi fidusia kepada pemilik fidusia.⁵⁴ Dari uraian tersebut jelas bagi kita bahwa pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi jaminan fidusia kepada kreditur kedudukannya bukanlah sebagai pemilik yang sebenarnya atas benda yang dijadikan objek jaminan tersebut. Tujuan penjaminan fidusia tersebut tidak dimaksudkan memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, melainkan sebagai jaminan belaka.

⁵¹ Oey Hoey Tiong, *Op.cit.* hlm. 57-58.

⁵² Rahmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 152. Pengertian *fiducia cum creditore* ialah hak milik atas suatu benda diserahkan sebagai jaminan dengan janji bahwa ia akan menyerahkannya kembali kepada debitor bila utangnya telah dibayar lunas.

⁵³ *Ibid*, hlm. 47

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.97

Kedudukan kreditur itu sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri. Oleh karena itu, dikatakan pula kewenangannya sebagai pemilik yang terbatas.⁵⁵

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

a. Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran “benda” yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan “ikatan” Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan debitur. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari debitur yang bersangkutan.⁵⁶

b. Permohonan dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan tersebut diajukan oleh penerima fidusia sendiri, kuasa atau wakilnya. Pendaftaran jaminan fidusia tidak harus dilakukan oleh kreditur, melainkan dapat dikuasa atau wakil dari kreditur. Kuasa disini adalah mereka yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.⁵⁷

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁵⁸

- 1) Secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- 2) Melalui Kantor Pendaftaran Fidusia
- 3) Oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya

⁵⁵Oey Hoey Tiong, *Op.cit*, hlm. 49

⁵⁶J. Satrio II, *Op.cit*, hlm. 250.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 209.

⁵⁸Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 210

- 4) Dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia secara formulir yang bentuk dan isinya sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000
- 5) Dilengkapi dengan:
 - a) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia, yaitu salinan akta yang menguraikan objek jaminan fidusia, termasuk salinan lampiran jika akta tersebut disertai lampiran
 - b) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia
 - c) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Pejabat pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, kemudian memeriksa kelengkapan persyaratan disini meliputi kelengkapan dokumen yang ditetapkan dan ketepatan dalam mengisi formulir sesuai dengan data yang diperlukan. Dalam hal ini pejabat pendaftaran jaminan fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran, tetapi hanya melakukan pengecekan data yang tercantum dalam formulir pernyataan pendaftaran. Adapun data-data yang harus didaftarkan tersebut, dengan sendirinya sudah dituangkan dalam formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dimuat hal-hal berikut:⁵⁹

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia
- 2) Identitas pihak penerima fidusia
- 3) Tanggal, nomor, akta jaminan fidusia
- 4) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- 5) Data perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) yang dijamin fidusia

⁵⁹*Ibid*, hlm. 211.

- 6) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 7) Nilai penjaminan
- 8) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

c. Buku Daftar Fidusia

Untuk melaksanakan pencatatan jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Jaaminan Fidusia menyediakan buku daftar fidusia, bahwa jaminan fidusia harus dicatat dalam suatu register khusus yang diadakan untuk itu, yang dinamakan buku daftar fidusia. Pencatatannya dilakukan pada tanggal diterimanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Tanggal tersebut terlepas dari tanggal perjanjian jaminan penjaminan dan tanggal pengiriman. Patokannya tanggal diterimanya permohonan. Karenanya, untuk pengiriman berkas dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi, tanggal tanda terima menentukan saat pendaftaran, tidak peduli kapan surat itu dibuka.⁶⁰

Pejabat pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang bersangkutan, mencatat semua data yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dalam buku daftar fidusia.

d. Saat Lahirnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya. Jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia, bukan pada saat terjadi pembebanan fidusia dengan dibuatnya akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Karena pendaftaran dalam buku daftar dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka tanggal lahir jaminan fidusia juga tanggal permohonan jaminan fidusia, sehingga tidak dimungkinkan ada fidusia dua kali berturut-turut atas benda jaminan yang sama, maka tanggal pendaftaran tersebut yang juga tanggal lahirnya jaminan fidusia mempunyai arti penting sekali, dalam hal debitur

⁶⁰ J. Satrio II, *Op.cit*, hlm. 253.

memfidusiakan benda jaminan fidusia dua kali atau lebih kepada dua atau lebih kreditur yang berlainan.⁶¹

e. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, telah diatur 3 jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bertalian dengan pelayanan jasa hukum dalam pendaftaran jaminan fidusia, yaitu mengenai biaya pendaftaran, biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, dan biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang.⁶²

5. Hapusnya Jaminan Fidusia

Ada kejadian-kejadian tertentu yang menyebabkan jaminan fidusia dianggap telah hapus oleh hukum. Kejadian-kejadian tersebut yang memuat dalam Pasal 25 Ayat (1) UUJF, sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda jaminan fidusia

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari jaminan fidusia yaitu adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang, tersebut hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, dengan sendirinya atau otomatis jaminan fidusia yang bersangkutan juga menjadi hapus. Yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur. Pengertian utang dalam Pasal 25 ayat (1) sub a UUJF hendaknya ditafsirkan secara luas, meliputi segala

⁶¹ *Ibid*, hlm. 212.

⁶² Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 213.

perikatan, karena pada dasarnya lembaga jaminan fidusia bisa dipakai untuk menjamin kewajiban prestasi yang timbul dari perikatan yang manapun.⁶³

Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur juga wajar mengingat pula kreditur sebagai yang memiliki hak fidusia tersebut, bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya. Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tentunya juga wajar, mengingat tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada.⁶⁴ Kecuali diperjanjikan lain, benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut. Artinya, jika benda yang dijadikan Jaminan Fidusia diasuransikan, seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi fidusia akan digunakan untuk pelunasan utangnya jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah.

Bahwa musnahnya benda objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi, sudah sendirinya, karena kalau benda yang bersangkutan diasuransikan, hak untuk mengkalim asuransi pengganti justru baru muncul, kalau benda objek jaminan musnah oleh peristiwa untuk mana telah dipertanggungjawabkan. Dimaksudkan bahwa sekali pun jaminan fidusianya hapus, tetapi hak atas klaim asuransi atas dasar pergantian benda, tetap ada pada kreditur.⁶⁵ Sebagai tindak lanjut terjadinya perubahan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mewajibkan kepada penerima fidusia untuk memberitakan tentang hapusnya jaminan fidusia yang telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.⁶⁶

⁶³*Ibid*, hlm. 178.

⁶⁴ Munir Fuadi, *Op.Cit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 50.

⁶⁵ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 304.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 306.

6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah manakalah hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien, dan mengandung kepastian hukum, jika debitur cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam UUIF, yaitu mengatur mengenai lembaga *parate* eksekusi.

Selama ini sebelum keluarnya UUIF, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi objek jaminan fidusia. Karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak penafsiran eksekusi objek jaminan fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal, melelahkan. Walaupun sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 1985, ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi dibawah tangan. Di samping syaratnya yang berat, eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan tentunya hanya berlaku atas fidusia yang berhubungan dengan rumah susun saja. Oleh karena itu, dalam praktik hukum, eksekusi fidusia di bawah tangan sangat jarang digunakan.⁶⁷

Sesungguhnya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi, dianut pula oleh lembaga hak jaminan kebendaan lainnya, seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi objek gadai dan hipotek disebutkan dalam Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 1178 (2) KUHPerdata, sedangkan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996. Demikian pula dalam pelaksanaan eksekusi benda yang dijadikan jaminan fidusia juga mudah dan pasti.

UUIF telah mengatur cara atau menciptakan beberapa model eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUIF, dapat diketahui bahwa apabila debitur

⁶⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 57.

atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.⁶⁸

- 1) Eksekusi berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, yang dilakukan penerima fidusia.
- 2) Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia.
- 3) Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditur pemberi fidusia sendiri.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUF merupakan suatu ketentuan bersyarat, yang berlaku apabila syarat yang disebutkan disana dipenuhi, yaitu syarat bahwa “debitur atau pemberi fidusia sudah cidera janji”. Ketentuan dalam pasal tersebut membedakan antara debitur dan pemberi fidusia, yang memang bisa merupakan dua orang yang berlainan. Kata “atau” mengajarkan kepada kita, bahwa yang cidera janji bisa debitur maupun pemberi fidusia. Karenanya harus bisa dibedakan antara cidera janji dari debitur (pemberi fidusia) dan pihak ketiga pemberi fidusia. Dalam hal ini debitur sendiri yang bertindak pemberi fidusia, sehubungan dengan penjaminan itu ada dua perjanjian yang ditutup oleh kreditur, yaitu perjanjian pokoknya untuk mana diberikan jaminan fidusia dan perjanjian penjaminan fidusia itu sendiri. Karena dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut dikatakan secara umum, cidera janji debitur meliputi baik pada perjanjian pokoknya maupun dalam penjaminannya, para pihak biasa memperjanjikan, bahwa apabila debitur tidak memenuhi janji-janji yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang mereka tutup, utang debitur seketika menjadi matang untuk ditagih.⁶⁹

Cidera janji disini bisa berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam

⁶⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 230.

⁶⁹ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 318.

perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminannya, sekalipun utangnya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditagih, dalam peristiwa itu, maka kreditur bisa melaksanakan eksekusinya terhadap benda jaminan fidusia.⁷⁰

a. Eksekusi Fidusia dengan Titel Eksekutorial

Ada beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial, yang disebut dengan istilah *grosse akta*, yaitu:⁷¹

- 1) Akta Hipotek
- 2) Akta pengakuan utang
- 3) Akta hak tanggungan
- 4) Akta fidusia

Menurut KUHAPerdata (HIR), setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa *grosse* daro akta hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris memiliki kekuatan sama dengan kekuatan putusan hakim.

Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dieksekusi dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (yang daerah hukumnya mencakup tempat berdiam atau tempat tinggal debitur, atau tempat kedudukan yang dipilih oleh debitur) menurut cara yang dinyatakan dalam pasal-pasal sebelum Pasal 224 ini, tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan sengan putusan hakim. Jika putusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian diluar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan itu, maka harus dituruti ketentuan dalam Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya dari HIR.⁷²

Pasal 14 UU Hak Tanggungan menyatakan sertifikat hak tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse* akta hipotik, sepanjang mengenai hak

⁷⁰*Ibid*, hlm. 319.

⁷¹Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁷²*Ibid*, hlm. 63.

atas tanggungan tanah. Kemudian Pasal 15 UUJF menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum penuh.

Yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi, Ketua Pengadilan tersebut akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud. Hanya saja, tidak jelas dalam undang-undang dan juga dalam praktik. Manakala ada pihak yang keberatan dalam fiat eksekusi tersebut.⁷³

b. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi Melalui Kantor Lelang

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan eksekusi oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang). Hasil pelelangan tersebut kemudian diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.⁷⁴

Ketentuan ini menghapus keragu-raguan sebelumnya bahwa seolah-olah setiap eksekusi lewat kantor pelelangan umum harus dengan suatu penetapan pengadilan. Padahal anggapan ini tidak benar.

c. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi Melalui Penjualan di Bawah Tangan

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi dengan cara menjual benda objek jaminan fidusia secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut UUJF, syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah:⁷⁵

- 1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Perlu diketahui bahwa pemberian persetujuan atau kesepakatan tersebut dapat dilakukan para pihak baik pada saat diikat fidusia, pada

⁷³*Ibid*, hlm. 64.

⁷⁴ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 321.

⁷⁵*Ibid*, Hlm. 232.

saat berlangsungnya fidusia, maupun pada saat menjelang proses fidusia.

- 2) Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - 3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang terkait.
 - 4) Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.
 - 5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
 - 6) Meskipun tidak ditentukan dengan tegas dalam UUJF, tentu saja objek baru dapat dieksekusi jika dalam proses eksekusi tersebut tidak ada yang keberatan atau tidak ada sengketa, sebab itulah salah satu tujuan pengumuman terhadap eksekusi.
- d. Eksekusi Fidusia secara Lelang Sendiri Tanpa Melalui Kantor Lelang

Meskipun tidak ditegaskan dalam UUJF, eksekusi objek jaminan fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan menjual lelang sendiri tanpa melalui kantor lelang dan pengadilan. Cara penjualan ini dapat dianggap sebagai salah satu varian dari eksekusi secara parate dengan cara menjual objek jaminan fidusia secara langsung oleh kreditur secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁷⁶

- e. Eksekusi secara Mendaku

Istilah “mendaku” dimaksudkan untuk membuat menjadi aku yang punya. Sehingga yang dimaksud adalah eksekusi fidusia dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa melewati transaksi apapun.⁷⁷

Ketentuan yang melarang mendaku dalam Pasal 33 UUJF memperlihatkan bahwa institusi hukum berwajah ganda. Disatu pihak,

⁷⁶*Ibid*, Hlm. 234.

⁷⁷ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 145,

fidusia hanya sebagai suatu jaminan utang semata-mata sehingga eksekusi secara mendaku memang tidak dibenarkan dan memang seharusnya demikian. Namun, di pihak lain, institusi hukum fidusia ini dianggap sebagai suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Maksudnya, objek jaminan fidusia tersebut sudah berpindah kepemilikannya kepada pihak kreditur, sementara pihak kreditur menyerahkan penguasaan atas benda tersebut kepada debitur secara kepercayaan. Dengan demikian, kepemilikan benda tersebut sudah beralih kepada pihak kreditur.

f. Eksekusi Fidusia Terhadap Barang Perdagangan dan Efek yang Dapat Diperdagangkan

Jika benda yang menjadi objek fidusia merupakan benda perdagangan atau efek yang

Jika benda objek jaminan fidusia merupakan benda diperdagangkan, maka eksekusi barang tersebut menurut Pasal 31 UUJF dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut. Artinya dimana tempat benda-benda persediaan atau efek bursa yang dapat diperdagangkan dimaksud lazim di perjual belikan, maka ditempat itulah eksekusi fidusianya dilakukan dengan cara menjualnya.⁷⁸

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :⁷⁹

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

⁷⁸ J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 325.

⁷⁹ Munir Fuady II, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Karena adakalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang lain. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri". Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.⁸⁰

Pasal 1365 KUHPerdato memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut :⁸¹

⁸⁰I.S. Adiwinata, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 184.

⁸¹R. Suryatin, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 82.

- 1) Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.
- 2) Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab.
- 3) Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:⁸²

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
- 3) Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan
- 4) Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

2. Tuntutan Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum

Ada hubungan yang erat antara ganti rugi yang terjadi karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian dengan apa yang dikenal dengan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban "tidak tepat waktu" atau "tidak layak", adalah jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti pula merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, jika diperhatikan bahwa ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat di dalam bagian wanprestasi tersebut juga berlaku akan halnya dengan ganti rugi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan pengertian lain, ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dapat diberlakukan secara sama dalam hal adanya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.⁸³

D. PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR

Pada praktiknya lembaga pembiayaan sering meminta jaminan berupa barang-barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,

⁸² Munir Fuadi, *Op.cit*, hlm. 22.

⁸³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 42.

mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi⁸⁴ atau melawan hukum⁸⁵. Adanya jaminan bagi debitur tersebut adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, disinilah pentingnya lembaga jaminan. Dalam praktik pihak lembaga pembiayaan sebagai kreditur lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat jaminan ini lebih menguntungkan pihak kreditur karena sifat dari jaminan ini memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak-hak jaminan khusus.⁸⁶

Menurut KUHPerdara Pasal 1459, debitur menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya sebagai jaminan hutang kepada kreditur, namun penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidak sempurna sebagaimana pemindahtanganan hak milik dalam perjanjian jual beli. Yang ditonjolkan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan itu adalah sifat dinamikanya, *overdracht* yaitu penyerahan yuridis sudah terjadi. Kreditur memiliki sebatas jaminan hutang. Larangan memiliki benda jaminan oleh pihak kreditur merupakan asas yang berlaku umum dalam perjanjian jaminan.⁸⁷

Dalam Jaminan Fidusia, penyerahan hak milik antara debitur dan kreditur dilakukan secara *constitutum possessorium* yang artinya benda yang menjadi objek perjanjian hanya diserahkan hak miliknya saja namun secara riilnya benda tersebut masih berada dalam kekuasaan si debitur. Oleh karena penyerahan hak milik dalam Fidusia tidak dilakukan secara nyata, maka UUJF mensyaratkan pembebanan fidusia dibuat dengan menggunakan akta notaris, hal tersebut untuk melindungi kepentingan kreditur. Penyerahan tersebut melahirkan hubungan kepercayaan secara timbal balik, karena debitur

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 60. Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah: Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

⁸⁵ Menurut Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

⁸⁶ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Bandung Maju, 2015, hlm. 37.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 282

memberikan kepercayaan kepada penerima fidusia sehingga penerima fidusia memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan jika debitur cidera janji atau melawan hukum. Sebaliknya penerima fidusia juga memberikan kepercayaan kepada debitur karena barangnya secara nyata berada dalam kekuasaan pihak debitur. Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan penerima fidusia untuk bisa mengambil pelunasan dari barang tersebut pada saat hak itu timbul, demikian juga sebaliknya.⁸⁸

Dalam perjanjian biasanya diperjanjikan, bahwa debitur boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur atau peminjam sendiri. Peminjam-pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain, tanpa izin dari Penerima fidusia.⁸⁹

Dalam Pasal 23 Ayat (2) UUJF menentukan bahwa, debitur dilarang mengalihkan atau memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan pada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila obyek jaminan fidusia tersebut beralih maka jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa debitur dapat memindahtangankan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Undang-Undang fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan misalnya mesin produksi, mobil pribadi, dan rumah susun. Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa

⁸⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 101

⁸⁹ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1997, hlm. 28

persetujuan dari penerima fidusia maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 UUF yang menentukan. Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁹⁰

Walaupun pada dasarnya barang yang telah dipindahtangankan itu merupakan kepunyaan debitur, akan tetapi debitur sudah menyerahkan kepada pihak kreditur sebagai jaminan dalam fidusia yang tentunya perbuatan tersebut sudah melalui dengan bentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia itu debitur harus meminta izin dulu kepada pihak kreditur paling tidak pihak kreditur mengetahui atas perbuatan debitur sudah melanggar asas-asas sahny suatu perjanjian yang sudah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan sahny suatu perjanjian :⁹¹

- a) Orang yang melakukan perjanjian harus cakap akan hukum
- b) Objek tertentu
- c) Adanya rasa sepakat diantara kedua belah pihak
- d) Sebab yang halal.

Pihak debitur diperbolehkan memindahtangankan atau menggadaikan obyek jaminan fidusia asalkan terdapat persetujuan dari si penerima fidusia. Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Dalam pasal 19 UUF menetapkan bahwa pemindahtanganan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru

⁹⁰ Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Surabaya: Media Nusa Creative, 2011, hlm. 3

⁹¹ *Ibid*, hlm. 69.

maupun pihak lain. Pemindahtanganan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya *cessi* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada debitur.

Setiap perbankan atau lembaga pembiayaan selaku penerima obyek jaminan fidusia sendiri pada dasarnya memiliki aturan dan tata pengalihan objek fidusia yg berbeda-beda satu sama lain. Pihak Debitur selaku debitur harus terlebih dahulu melaporkan kepada lembaga pembiayaan apabila akan mengalihkan benda yang merupakan obyek jaminan fidusia. Pihak ketiga selaku pihak yang akan menerima pengalihan ketika berniat membeli obyek jaminan fidusia pun harus memastikan bahwa pihak lembaga pembiayaan memperbolehkan dilakukan pemindahtanganan, jangan sampai melakukan proses ilegal yang nantinya akan merugikan semua pihak. Penting bagi pihak ketiga untuk memperhatikan hal-hal tersebut sebelum melakukan pemindahtanganan terhadap obyek jaminan fidusia karena jaminan fidusia mempunyai hak prefensi dari penerima fidusia. Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUJF yang bunyinya:

“Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF, yang bunyinya:

”Hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur.”

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:⁹²

⁹² Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 23.

- a) Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua
- b) Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan
- c) Karena fidusia ulang memang dilarang oleh UUJF.

Meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah, pihak ketiga dalam melakukan pemindahtanganan dengan pemilik obyek jaminan fidusia harus dilakukan secara legal di hadapan kreditur karena pengalihan yang dilakukan secara ilegal bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri di kemudian hari, pemindahtanganan harus diketahui oleh perusahaan pemberi kredit selaku penerima obyek jaminan fidusia.

Pemindahtanganan obyek jaminan fidusia yang legal akan memberikan perlindungan hukum utamanya bagi Pihak Ketiga selaku pembeli obyek jaminan fidusia tersebut agar dapat tercatat oleh lembaga pembiayaan ataupun ketika akan melakukan pelunasan tidak muncul kendala pada saat pengambilan obyek jaminan fidusia tersebut. Pihak ketiga akan memperoleh kepastian hukum terhadap barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan mengurangi resiko terjadinya permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Pemindahtanganan objek fidusia jaminan fidusia itu harus dengan sepengetahuan kreditur yang terdahulu, apabila pengalihan objek jaminan itu tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur terdahulu, maka tindakan seperti itu tidak dibenarkan oleh hukum.

Dalam perjanjian biasanya diperjanjikan, bahwa debitur boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur atau peminjam sendiri. Peminjam-pakai

dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain, tanpa izin dari Penerima fidusia.⁹³

Dalam Pasal 23 Ayat (2) UUJF Fidusia menentukan bahwa, debitur dilarang mengalihkan atau memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan pada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila obyek jaminan fidusia tersebut beralih maka jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa debitur dapat memindahtangankan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Undang-undang fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan misalnya mesin produksi, mobil pribadi, dan rumah susun. Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 UUJF yang menentukan. Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁹⁴

⁹³ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1997, hlm. 28

⁹⁴ Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Surabaya: Media Nusa Creative, 2011, hlm. 3

BAB III
PRAKTIK PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
DEBITUR KE TANGAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM
DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL

A. Gambaran PT. Federal International Finance

1. Profil PT. Federal International Finance

PT. Federal International Finance adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. PT. Federal International Finance didirikan dengan nama Mitrapusaka Artha Finance pada tanggal 1 Mei 1989. Perusahaan berganti nama pada tahun 1991 menjadi PT Federal International Finance. Pada awalnya, PT Federal International Finance bergerak di bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang. Seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, sejak tahun 1996 Perseroan berfokus pada pembiayaan sepeda motor merek Honda. Identitas perusahaan atau brand FIFGROUP sendiri diluncurkan pada tahun 2013 menandai transformasi bisnis Perseroan dalam bisnis pembiayaan di Indonesia. Per akhir tahun 2017, Perseroan memberikan layanan pembiayaan untuk kendaraan bermotor dan pembiayaan multiguna yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.⁹⁵

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 bidang usaha PT. FIFGROUP meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi dan/atau kegiatan berbasis fee, Pembiayaan Syari'ah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syari'ah. Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh PT. FIFGROUP mulai dari pembiayaan konvensional sampai pembiayaan yang berbasis syari'ah dengan nama merek berikut:⁹⁶

⁹⁵<http://www.fifgroup.co.id>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2020, pukul 19.27.

⁹⁶Dokumen Laporan Tahunan PT. Federal International Finance 2018.Hlm. 68.

a. FIFASTRA

Jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda. Baik motor baru maupun bekas berkualitas.

b. AFTRA

Jasa layanan pembiayaan mobil, baik mobil baru maupun mobil bekas.

c. SPEKTRA

Jasa layanan pembiayaan multiproduk, mulai dari elektronik, perabot rumah tangga, peralatan komputer, furnitur, sepeda sampai dengan traktor tangan. Jasa layanan pembiayaan ini meliputi metode pembiayaan konvensional maupun syariah.

d. AMITRA

Jasa layanan pembiayaan untuk usaha mikro modal usaha dan pembiayaan Haji.

Pada tahun 2019 PT. FIFGROUP sudah memiliki 216 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya kantor cabang PT. FIFGROUP yang berada di Kota Semarang beralamat di Jalan Pamularsih Nomor 71, Bongsari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148. PT. FIFGROUP cabang Kota Semarang berdiri pada tanggal 25 November 2011 dengan wilayah kerjanya meliputi Kota Semarang.

PT. FIFGROUP hadir untuk memenuhi keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas. “Mengubah tantangan menjadi peluang” adalah landasan pemikiran yang membuat PT Federal International Finance terus berkembang. Pencapaian PT. FIFGROUP tidak diragukan lagi, lembaga pembiayaan konsumen PT. FIFGROUP cabang Kota Semarang mampu memberikan kontribusi sebesar 10% sampai 20% dari total penjualan produk nasional. Penyaluran kredit di cabang Kota Semarang yang tertinggi untuk area Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹⁷

⁹⁷Viola Agnesia, Selaku Kepala Pendukung Pemasaran PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang, *Wawancara*, Semarang 17 Januari 2020.

Nilai-nilai dalam PT. Federal International Finance yang selalu menjadi budaya perusahaan untuk memajukan perusahaan ialah:⁹⁸

a) *Teamwork*

Mendorong semangat semua insan untuk bersinergi yang didasari oleh sikap saling menghargai, berpikir positif serta mengutamakan kepentingan Perseroan agar menghasilkan kinerja yang optimal.

b) *Excellence*

Mendorong semua insan untuk mengutamakan layanan unggul pada konsumen eksternal dan internal melalui proses yang sederhana, lugas serta berkualitas yang didasari oleh sikap pro aktif dalam melakukan perbaikan berkesinambungan.

c) *Achieving*

Mendorong semua insan berintegritas dan berkomitmen untuk terus meningkatkan prestasi kerja setinggi-tingginya dengan mengedepankan profesionalisme untuk menghasilkan inovasi-inovasi.

d) *Moving Forward*

Mendorong semua insan agar peka dan tanggap terhadap perubahan serta berwawasan jauh ke depan dalam merancang dan melakukan perubahan strategis.

2. Visi, Misi, dan Tujuan PT. Federal International Finance

Adapun Visi, Misi dan Tujuan dari PT. FIFGROUP, yaitu sebagai berikut:⁹⁹

a. Visi

Memastikan PT. FIFGROUP menjadi perusahaan yang dikagumi serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar lingkungan kantor.

⁹⁸Dokumen Laaporan Tahunan PT. Federal International Finance Tahun 2018.

⁹⁹Document prospectus PT. Federal International Finance Tahun 2016.

- 2) Membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar lingkungan kantor.
 - 3) Menciptakan *image* perusahaan yang positif bagi masyarakat.
 - 4) Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan sehat bagi karyawan.
- c. Tujuan
- 1) Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan investasi;
 - 2) Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja;
 - 3) Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan multiguna;
 - 4) Menjalankan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee.

3. Produk-Produk PT. Federal International Finance

Adapun produk-produk pembiayaan dari PT. FIFGROUP, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam akta No. 13 tertanggal 4 Agustus 2015 dan juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Pembiayaan Konvensional

Pembiayaan konvensional pada PT. FIFGROUP baik itu daerah Semarang maupun daerah yang lainnya terdiri dari:

- 1) Pembiayaan Motor, yang terdiri dari pembiayaan motor baru dan bekas.

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembiayaan motor—baru, yaitu:

- a) Foto Copy KTP Suami Istri
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Rekening Listrik
- d) Buku Tabungan 3 Bulan Terakhir
- e) Slip Gaji

¹⁰⁰Dokumen Laporan Tahunan PT. Federal International Finance Tahun 2018.

Pembiayaan sepeda motor baru hanya untuk produk Honda. Sedangkan Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembiayaan motor— bekas, yaitu:

- a) Foto Copy KTP Suami Istri
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Rekening Listrik
- d) Foto Copy STNK
- e) BPKB

Pembiayaan sepeda motor bekas diperbolehkan untuk memilih produk selain Honda seperti Suzuki, Yamaha dan sebagainya.

2) Pinjaman Dana Tunai .

Persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu:

- a) Foto Copy KTP Suami Istri
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) STNK
- d) BPKB
- e) Nomor Angka dan Mesin dari FIF Card

3) Spektra

Persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu:

- a) Cukup KTP / SIM
 - b) Foto Copy Kartu Keluarga (Tergantung Markettingnya)
- 4) Usaha Mikro Persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu:
- a) Foto Copy KTP Suami Istri
 - b) Foto Copy Kartu Keluarga
 - c) Rekening Listrik / Telepon
 - d) SKU (Surat Keterangan Usaha)
 - e) Foto Copy Buku Rekening Jaminan berupa BPKB / SERTIFIKAT

b. Pembiayaan Syariah

Adapun pembiayaan syariah pada PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan Motor, yang terdiri dari motor baru dan motor bekas.

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembiayaan motor baru, yaitu:

- a) Foto Copy KTP Suami Istri
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Rekening Listrik
- d) Buku Tabungan 3 Bulan Terakhir
- e) Slip Gaji

Pembiayaan sepeda motor baru hanya untuk produk Honda. Sedangkan Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembiayaan motor bekas, yaitu:

- a) Foto Copy KTP Suami Istri
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Rekening Listrik
- d) Foto Copy STNK
- e) BPKB

Pembiayaan sepeda motor bekas diperbolehkan untuk memilih produk selain Honda seperti Suzuki, Yamaha dan sebagainya.

2) Pembiayaan Haji

Persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu:

- a) Foto Copy KTP Suami Istri
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) PBB / Rekening Listrik
- d) NPWP

B. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen di PT. Federal International Finance

Pelaksanaan pembiayaan konsumen pada PT. FIFGROUP memfokuskan kegiatannya pada berbagai produk seperti sepeda motor, barang elektronik,

maupun pembiayaan haji. Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan mengenai prosedur pembiayaan konsumen, sebagai berikut:¹⁰¹

1. Permohonan calon debitur kepada pihak PT. FIFGROUP

Dalam tahap pengajuan permohonan pembiayaan ini, calon debitur dibantu oleh *Credit Marketing Officer*¹⁰² dalam memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Persyaratan minimal dalam pembiayaan konsumen diantaranya fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak, fotocopy slip gaji atau surat keterangan penghasilan, jikalau berwirausaha harus ada surat keterangan usaha. Selain syarat-syarat tersebut, calon debitur harus mencantumkan data penjamin. Penjamin dalam hal ini bagi calon penjamin yang belum menikah yaitu orang tua, dan bagi orang yang sudah menikah bukan hanya sebatas suami atau istri melainkan keluarga atau kerabat yang tidak satu tempat tinggal dengan calon debitur. Setelah semua data dikumpulkan oleh *Credit Marketing Office*, kemudian data diinput oleh PT. FIFGROUP Pengecekan data calon debitur.

Data calon debitur yang sudah di *Credit Marketing Officer* diteruskan ke bagian *credit analyst*.¹⁰³ Selanjutnya melakukan verifikasi mengenai kebenaran data calon debitur tersebut. Verifikasi dilakukan menanyakan langsung data keasliannya serta memfoto dokumen asli. Setelah itu PT. FIFGroup melakukan permintaan informasi data calon debitur kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk melihat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari data calon debitur yang menunjukkan bahwa calon debitur pernah mempunyai jejak kredit dan tidak

¹⁰¹ Viola Agnesia, Selaku Kepala Pendukung Pemasaran PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang, *Wawancara*, Semarang 17 Januari 2020.

¹⁰² *Credit Marketing Officer* ialah bagian dari salah satu divisi di perusahaan leasing atau finance atau pembiayaan. Tugasnya adalah sebagai marketing dari perusahaan leasing tersebut serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga angsuran premature bulan) agar tidak menunggak. <http://ekonomikaya.blogspot.com/2017/04/tanggung-jawab-dan-tugas-cmo-credit.html>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2020, Pukul 13.52 WIB.

¹⁰³ *Credit analyst* ialah orang yang menganalisis permohonan kredit dari berbagai aspek yang terkait untuk melakukan penilaian kelayakan usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Analisis tersebut meliputi, antara lain, aspek hukum, lingkungan, keuangan, pemasaran, produksi, manajemen, ekonomi. <https://resources.urbanhire.com/credit-analyst>. diakses pada tanggal 29 Januari 2020, pukul 20.00 WIB.

memenuhi kewajibannya dalam peminjaman uang dengan bank-bank di Indonesia atau tidak.

2. Hasil *credit analyst*

Setelah data diverifikasi oleh *credit analyst*, kemudian pihak PT. FIFGROUP akan mengeluarkan keputusan untuk melakukan pembiayaan konsumen atau tidak. Didalam pemberian keputusan PT. FIFGROUP dikenal terdapat tiga kemungkinan yaitu *approve*,¹⁰⁴ *reject*¹⁰⁵ dan *cancel*. Pertimbangan dalam memutuskan hasil pembiayaan konsumen meliputi analisis mampu atau tidak calon debitur mengangsur perbulan berdasarkan data yang diberikan serta survey lapangan, hasil informasi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta karakter calon debitur.

Contoh hasil permintaan informasi data calon debitur yang didapat dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dibawah naungan lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁰⁴ Approve ialah Persetujuan kredit oleh pihak yang berwenang.

¹⁰⁵ Reject ialah Penolakan kredit oleh pihak yang berwenang.

Gambar 3.1
Contoh Hasil informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi
Keuangan (SLIK)

Kredit/Pembiayaan													
Pelapor 426 - BANK MEGA			Cabang BANK MEGA KPO-Tendean			Baki Debet Rp 9.748.784,00			Tanggal Update 08 Februari 2019				
		Feb 18	Mar 18	Apr 18	Mei 18	Jun 18	Jul 18	Agst 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Des 18	Jan 19
Kualitas / Jumlah Hari Tunggakan		S 210	S 1	S 210	S 210	S 210	S 210	S 210	S 210	S 210	S 210	S 210	S 210
No Rekening							Kualitas		S - Macet				
Sifat Kredit/Pembiayaan		Lainnya					Jumlah Hari Tunggakan		210				
Jenis Kredit/Pembiayaan		Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syariah					Nilai Proyek						
Akad Kredit/Pembiayaan		Konvensional					Plafon Awal		Rp 6.000.000,00				
Frekuensi Perpanjangan Kredit/ Pembiayaan		0					Plafon		Rp 6.000.000,00				
No Akad Awal							Realisasi/Pencairan Bulan Berjalan		Rp 0,00				
Tanggal Akad Awal							Nilai dalam Mata Uang Asal		Lainnya				
No Akad Akhir							Sebab Macet		Lainnya				
Tanggal Akad Akhir							Tanggal Macet		28 Januari 2016				
Tanggal Awal Kredit		08 Agustus 2011					Tunggakan Pokok		Rp 9.748.784,00				
Tanggal Mulai		08 Agustus 2011					Tunggakan Bunga		Rp 0,00				
Tanggal Jatuh Tempo		31 Agustus 2016					Frekuensi Tunggakan		1				
Kategori Debitur		Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					Denda		Rp 0,00				
Jenis Penggunaan		Konsumsi					Frekuensi Restrukturisasi		0				
Sektor Ekonomi		Bukan Lapangan Usaha Lain					Tanggal Restrukturisasi Akhir						
Kredit Program Pemerintah		Kredit Bukan Program Pemerintah					Cara Restrukturisasi						
Kab/Kota Lokasi Proyek		Kab. Sidoarjo					Kondisi		Dihapusbukukan				
Valuta		IDR					Tanggal Kondisi		28 Januari 2016				
Suku Bunga/Imbalan		26,95 %					Jenis Suku Bunga/Imbalan		Suku Bunga Fixed				
Keterangan		CC_3515141211890001											
Nomor Laporan: 651499/IDE/0101008/2019 Operator: Eny Masliah Tanggal Pemintaan: 12 Februari 2019 15:55:00 Kode Ref. Pengguna: BKJ008.CIV.GSK/IDE/3926/2019													
Perekam Data Terakhir: Januari 2019 LK: 008 - 555 Penitikan: 03 Tanggal Dibentuk: 12 Februari 2019 15:55:00													

Halaman 1 dari 2

3. Perjanjian

Sebelum dilakukan perjanjian, pihak PT. FIFGROUP melakukan sosialisasi kepada calon debitur berisi perjanjian pembiayaan. Sosialisasi isi pembiayaan wajib dilakukan untuk memastikan bahwa calon debitur mengetahui secara jelas isi perjanjian pembiayaan yang dilakukan. Setelah dilakukan sosialisasi dan pihak calon debitur menyetujui semua perjanjian, debitur melakukan pembayaran pertama berupa uang muka.

4. Pemesanan barang

Setelah perjanjian dilakukan, dilakukan pemesanan barang dalam hal ini sepeda motor kepada *supplier* atau *dealer*. Pemesanan diwujudkan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) yang ditandatangani oleh *credit analyst*. *Purchase Order* ialah surat yang menjelaskan bahwa debitur dapat mengambil barang yang telah dimohonkan pengajuannya. Kemudian dilakukan PO register. Setelah proses PO register, dicetak PO asli yang akan dilampirkan untuk kelengkapan data funding.

5. Pembayaran kepada *dealer*

Setelah barang dari *dealer* diserahkan kepada nasabah, kemudian dilakukan pembayaran oleh pihak PT. FIFGROUP Cabang Semarang kepada *dealer* yang bersangkutan. Pembayaran tersebut dilakukan setelah pihak PT. Federal International Finance memastikan kembali kepada debitur bahwa barang telah diterima dengan baik.

6. *Follow up* ke debitur

PT. FIFGROUP mengirimkan mengirimkan pesan singkat melalui nomor telepon kepada debitur yang berisi menginformasikan kembali nomor kontrak, jumlah angsuran, tanggal jatuh tempo, dan tempat dimana nasabah melakukan pembayaran (datang langsung ke kantor PT. Federal International Finance terdekat, Indomaret, Alfamart, dan sebagainya).

PT. FIFGROUP telah berupaya meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari yang disebabkan oleh faktor internal PT. FIFGROUP sendiri. Karena proses pembiayaan konsumen saat ini sangat detail dan sangat mudah dipantau oleh *head office*. Selain dari pihak PT. FIFGROUP, terdapat kemungkinan bahwa penyebab pembiayaan konsumen bermasalah dikemudian hari pada saat proses pengangsuran disebabkan dari pihak debitur tersebut, diakibatkan oleh dua hal yaitu kesadaran yang rendah dari debitur untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, atau karena adanya keadaan yang memaksa .

Sebelum tanggal jatuh tempo, pihak PT. FIFGROUP akan mengingatkan via telepon kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mengurangi resiko nasabah menggunakan alasan kesibukan pribadinya sehingga tidak dapat melakukan pembayaran.¹⁰⁶

¹⁰⁶Viola Agnesia, Selaku Kepala Pendukung Pemasaran PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang, *Wawancara*, Semarang 17 Januari 2020.

C. Praktik Pemindahtanganan Jaminan Fidusia oleh Debitur secara Melawan Hukum Di PT. FIFGROUP

Dalam suatu transaksi dan/atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi) hal tersebut tertuang dalam teori *Pacta sunt servenda*, Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diperjanjikan. Apabila didalam perjanjian fidusia debitur tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahannya yang disengaja maupun tidak disengaja maka ia telah melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian, sebagaimana Asas Konsensualisme berarti dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka.¹⁰⁷

Perbuatan yang sering dilakukan oleh debitur adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu Perbuatan Melawan Hukum dengan memindahtangankan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan ke orang lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. FIFGROUP. Hal ini tentunya akan merugikan pihak PT. FIFGROUP sebagai kreditur, karena debitur telah melanggar perjanjian dengan melakukan suatu hal yang tidak diperoleh dalam perjanjian.

PT. FIFGROUP dalam memberikan pembiayaan konsumen, penyerahan hak milik antara debitur dan kreditur dilakukan secara *constitutum possessorium* yang artinya benda yang menjadi objek perjanjian hanya diserahkan hak miliknya saja namun secara riilnya benda tersebut masih

¹⁰⁷ Nelson Abednego Situmeang, Herdi Kuingo, Moestar Arifin, "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2019, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/331777824_KEBEBASAN_BERKONTRAK_DALAM_PERJANJIAN_KREDIT_BAKU_PEMBIAYAAN_KONSUMEN pada tanggal 7 Maret 2020, pukul 23.25.

berada dalam kekuasaan si debitur.¹⁰⁸Oleh karena penyerahan hak milik dalam Fidusia tidak dilakukan secara nyata, maka Undang-Undang Fidusia mensyaratkan pembebanan fidusia dibuat dengan menggunakan akta notaris, Hal tersebut untuk melindungi kepentingan kreditur.Penyerahan tersebut melahirkan hubungan kepercayaan secara timbal balik, karena debitur memberikan kepercayaan kepada kreditur sehingga kreditur memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan jika debitur cidera janji atau melawan hukum.Sebaliknya penerima fidusia juga memberikan kepercayaan kepada debitur karena barangnya secara nyata berada dalam kekuasaan pihak debitur.Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan penerima fidusia untuk bisa mengambil pelunasan dari barang tersebut pada saat hak itu timbul, demikian juga sebaliknya.

Dalam Pasal 23 Ayat (2) UUF menentukan bahwa, debitur dilarang mengalihkan atau memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan pada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila obyek jaminan fidusia tersebut beralih maka jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada.Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa debitur dapat memindahtangankan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.Undang-undang fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan misalnya mesin produksi, mobil pribadi, dan rumah susun. Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanakan sebagaimana

¹⁰⁸ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm. 37.

ketentuan dalam Pasal 36 UUJF yang menentukan. Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Realita jaminan fidusia di lapangan khususnya di PT. FIFGROUP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kata lain masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur ke tangan orang lain tanpa persetujuan pihak PT. FIFGROUP. Hal ini dipicu karena jaminan fidusia dianggap lembaga yang paling gampang dan mudah untuk mendapatkan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh semua orang, karena dalam jaminan fidusia itu pemindahtanganan suatu hak berdasarkan atas kepercayaan belaka.

Dalam praktik kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur tanpa persetujuan dari kreditur tentu merugikan banyak pihak terutama pihak kreditur. Data didapat dari PT. FIFGROUP selaku pihak kreditur pada tahun 2017 – 2019 terdapat 18 kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur, yaitu meliputi debitur menjual dan menggadaikan objek jaminan fidusia (kendaraan bermotor) ketangan orang lain tanpa persetujuan dari pemberi fidusia

Dari hasil wawancara dengan debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum, berikut merupakan beberapa kronologi kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara melawan hukum di PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang selama tahun 2017-2018, antara lain:

1. Bapak AA

AA selaku debitur mendapat fasilitas kredit pembiayaan dari PT. FIFGROUP untuk pembelian 1 unit sepeda motor merk Vario sebagaimana tersebut dalam perjanjian pembiayaan untuk jangka waktu pembayaran selama 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar Rp. 550.000,- per bulannya terhitung dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2020 dengan total

fasilitas kredit sebesar Rp. 15.560.000,- dan motor tersebut telah didaftarkan sertifikat fidusia dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Tengah selaku kantor pendaftaran fidusia. Awalnya Pak AA masih lancar dan tertib membayar angsuran selama 9 bulan pertama, akan tetapi memasuki angsuran ke 10 tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran.

Pak AA, ditelepon dari FIFGROUP beliau mengatakan motor tersebut sudah dijual kepada Bapak G dengan perjanjian oper kredit pada saat itu mulai angsuran ke 6 namun tanpa izin PT. Federal International Finance. Namun FIFGROUP tetap mendesak Pak AA untuk segera melunasi angsuran motor tersebut. Akhirnya Pak AA merasa dirugikan ia menelepon dan mengejar-mengejar Bapak G untuk menyelesaikan sesuai perjanjian yang dibuat, karna Pak AA merasa sudah bukan kewajiban Pak AA untuk melunasi. Pak AA beralasan menjual karena beliau ingin membeli sepeda motor yang baru sehingga menjual sepeda motor vario tersebut. Sampai akhirnya menurut beliau motor tersebut diambil paksa oleh *debt collector* dari PT. Federal International Finance di rumah Bapak G.¹⁰⁹

Pada kasus ini, motif dari pemindahtanganan sepeda motor yang dilakukan oleh bapak AA akbar dijual over kredit dan berkeyakinan Bapak G akan beriktikad baik pembelinya memenuhi kewajiban pembayaran angsuran selanjutnya.

2. Ibu TW

Ibu TW selaku debitur di PT. FIFGROUP mendapat pembiayaan kredit untuk 1 unit sepeda motor bermerk Beat POP CBS, seperti halnya kasus sebelum-sebelumnya awalnya debitur lancar membayar angsuran namun pada saat angsuran ke 7 tidak lagi membayar dengan alasan bahwa sudah tidak sanggup membayar angsuran tersebut dan mengatakan bahwa

¹⁰⁹ Alvian Akbar, Selaku debitur PT. Federal International Finance, *Wawancara*, Semarang 22 Januari 2020.

karena permasalahan ekonomi akhirnya sepeda motor tersebut ia gadaikan ke adiknya, dengan harapan uang hasil gadai tersebut dapat untuk membayar tagihan serta keterlambatan. Mulanya hal tersebut lancar, akan tetapi setelah tiba pada bulan berikutnya, Ibu TW mengalami permasalahan yang sama, bahkan bertambah lagi berlum menebus motor dari adiknya. Beliau mengaku dihubungi pihak PT. FIFGROUP tetapi beliau pasrah karena tidak ada uang. Menurut keterangan beliau akhirnya PT. FIFGROUP mengambil motor bermerk Beat POP CBS tersebut secara paksa ditengah jalan pada saat sedang dibawa adik Ibu TW dan menyuruh adiknya ikut ke kantor dan menjelaskan alasannya di kantor dan beliau dihubungi oleh adiknya.¹¹⁰

Pada kasus ini, motif dari pemindahtanganan sepeda motor yang dilakukan oleh Ibu TW tidak lain merupakan faktor ekonomi atau ketidakmampuan membayar, sehingga beliau menggadaikan motor tersebut ke adiknya.

3. Bapak AM

Pada kasus ini, motif dari pemindahtanganan sepeda motor yang dilakukan oleh Pak AM tidak lain merupakan faktor ekonomi atau ketidakmampuan membayar, berkeyakinan Bapak S akan beriktikad baik pembelinya memenuhi kewajiban pembayaran angsuran selanjutnya.

Dari kasus-kasus yang terjadi diatas, pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur yang belum melunasi hutangnya tanpa persetujuan kreditur, merupakan suatu PMH, karena perbuatan pengalihan tersebut membawa kerugian kepada kreditur karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa:¹¹¹

¹¹⁰ Tri Widya, Selaku debitur PT. Federal International Finance, *Wawancara*, Semarang 25 Januari 2020.

¹¹¹ R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm .346.

“Tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian”.

Ketentuan dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa menjual, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pasal 23 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa:

“Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Faktanya bahwa di PT. FIFGROUP masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, keyakinan debitur akan iktikad baik pembelinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia. Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur dan ada juga yang tidak mengetahui mengenai pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang harus melalui persetujuan kreditur. Pemindahtanganan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur banyak dilakukan oleh para debitur kepada pihak ketiga. Bentuk perjanjian pun seringkali dibuat di bawah tangan bahkan kadang hanya dilakukan secara lisan saja dengan bukti kwitansi pembelian. Harus dipastikan bahwa pemindahtanganan dilakukan secara legal yaitu dengan cara membuat Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban yang diketahui oleh pihak kreditur. Selain itu, khususnya bagi pihak ketiga harus memastikan tidak ada masalah pada transaksi kredit sebelum proses pengalihan dilaksanakan.

Pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur, tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Walaupun objek kredit tersebut telah berpindah tangan kepada orang lain, debitur yang berutang kepada kreditur lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Berbeda halnya apabila pengalihannya dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

Akibat dari perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dituntut melalui pelanggaran perdatan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUJF. Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas, bahwa kreditur telah rugi sebesar berapa besarnya jaminan yang difidusiakan ditambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Akibat kerugian yang dialami oleh pihak kreditur tentunya ia dapat meminta kembali atau menarik kembali dari debitur yang telah merugikan itu. Segala perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak kreditur tidak dapat diakui kreditur. Sehingga janji-janji (prestasi) antara kreditur dan debitur tetap mengacu pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani pada awal pencairan kredit. Sehingga segala bentuk pertanggung-jawaban atas pelunasan kredit pada kreditur tidak dapat dialihkan secara bawah tangan.

Semestinya jika debitur ingin menjual atau menyewakan objek jaminan fidusia, debitur memberitahukan terlebih dahulu kepada kreditur bahwa debitur ingin memindahtangankan objek jaminan fidusia karena berbagai faktor penyebabnya. Dengan melakukan hal tersebut debitur tidak akan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum atau perjanjian sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

BAB IV
ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PEMINDHTANGANAN
OBJEKJAMINAN FIDUSIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
DEBITUR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL

A. Problem Penyelesaian Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Melawan Hukum

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis, dalam kasus perbuatan melawan hukum yang sering dialami kreditur kaitannya dengan kerugian dalam perjanjian pembiayaan yaitu debitur melakukan perbuatan yang membawa kerugian PT. FIFGROUP. PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi perbuatan yang melanggar hak kreditur atau orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat, PMH yang dilakukan debitur di PT. FIFGROUP sebagai berikut:

1. Objek jaminan fidusia dijual ketangan orang lain tanpa persetujuan pihak PT. FIFGROUP Cabang Semarang.
2. Objek jaminan fidusia digadaikan tanpa persetujuan pihak PT. FIFGROUP Cabang Semarang.
3. Objek jaminan fidusia disewakan tanpa persetujuan pihak PT. FIFGROUP Cabang Semarang.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya) yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan pembiayaan konsumen dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara debitur dengan kreditur seperti ketentuan pembayaran angsuran, kewajiban debitur, pembayaran denda, asuransi, wanprestasi, penyelesaian sengketa dan sebagainya.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah diformalkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen, selalu ditegaskan bagaimana cara penyelesaian jika timbul perselisihan atau pertentangan kedua belah pihak. Pasal 11 Angka 11.2 Perjanjian Pembiayaan di PT. FIFGROUP ditentukan cara penyelesaian jika terdapat perselisihan yang berbunyi:¹¹²

“Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Mengenai segala perselisihan, pertentangan, atau tuntutan yang lahir dari Perjanjian ini, kecuali bila dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dimana jasa layanan diberikan KREDITUR, tanpa mengurangi hak dari KREDITUR untuk mengajukan gugatan terhadap DEBITUR melalui badan peradilan lainnya, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan DEBITUR dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan/eksepsi dalam bentuk ataupun mengenai kewenangan suatu pengadilan dalam memeriksa dan pengadili perkara yang diajukan oleh KREDITUR.”

Berdasarkan pasal di atas terdapat dua cara melakukan penyelesaian kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur secara melawan hukum di PT. FIFGROUP yaitu dengan cara:

1. Diluar peradilan (Musyawarah)
2. Peradilan

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan salah satu cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara para pihak yang bersengketa, dalam penyelesaian tersebut dilakukan pembahasan bersama menemukan *win-win solution*. Sedangkan penyelesaian lewat jalur pengadilan merupakan jalur terakhir untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara kreditur dengan debitur, di mana penyelesaian itu dilakukan di muka dan dihadapan Pengadilan. Pengadilanlah yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut.¹¹³

Menurut penuturan dari Ibu Viola Agnesia selaku Kepala Pendukung Pemasaran di PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang pada umumnya mengambil jalur diluar pengadilan. Jika diluar pengadilan tetap tidak berhasil

¹¹² Surat Perjanjian Pembiayaan PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang.

¹¹³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 89.

dilakukan dengan cara penarikan objek jaminan fidusia pada debitur yang dilakukan oleh *collector internal*.¹¹⁴Menjadi kewajiban PT. FIFGROUP sebagai kreditur bertanggung jawab mengawasi objek jaminan yang dijadikan jaminan fidusia, memastikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada di tangan debitur bukan dipindahtangankan ke tangan orang lain yang berakibat penyalahgunaan objek jaminan fidusia. Namun pada kenyataan di lapangan PT. FIFGROUP sangat kesulitan untuk mengecek terhadap keberadaan objek jaminan fidusia dengan alasan objek jaminan fidusia tersebut merupakan benda bergerak sehingga sulit untuk tahu apakah objek jaminan fidusia itu dijual atau disewakan ke tangan orang lain atau tetap berada di tangan debitur, sehingga biasanya kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia ke tangan orang lain baru diketahui pihak PT. FIFGROUP jika debitur telah menunggak angsuran dan mendatangi ke rumah debitur untuk menanyakan keterlambatan angsuran ternyata objek yang dijadikan jaminan fidusia sudah dipindahtangankan ke tangan orang lain tanpa persetujuan kreditur.¹¹⁵

Jika debitur memindahtangankan dalam bentuk apapun ke tangan orang lain yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan PT. FIFGROUP, maka PT. FIFGROUP dapat mengambil kembali kendaraan di tangan siapapun kendaraan itu berada. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti rugi”.

Sehingga pemindahtanganan objek jaminan fidusia kepada orang lain atau musnah tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi kendaraan

¹¹⁴*Collector internal* ialah orang yang berfungsi sebagai pengingat (reminder) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan.<https://catatandebtcollection.wordpress.com/2013/03/20/collector-menurut-level-tugasnya/> diakses pada tanggal 23 Februari 2020. Pukul 11.28.

¹¹⁵Violla Agnesia, Selaku Kepala Pendukung Pemasaran PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang, Wawancara, Semarang 17 Januari 2020.

tersebut.¹¹⁶Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur, PT. FIFGROUP dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, seperti yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi:¹¹⁷

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Hasil wawancara dengan Ibu Viola Agnesia selaku kepala pendukung pemasaran, wawancara pada tanggal 17 Januari 2020, sebelum dilakukan penyitaan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan jika debitur awalnya menunggak angsuran sampai akhirnya PT. FIFGROUP tahu bahwa objek jaminan fidusia sudah tidak ada ditangan debitur, meliputi:¹¹⁸

1. Apabila mendekati jatuh tempo angsuran pihak PT. FIFGROUP akan menelepon debitur untuk mengingatkan bahwasanya sudah mendekati jatuh tempo dan mohon untuk segera mengangsur.
2. Jika debitur tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo, maka 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo, pihak PT.

¹¹⁶Auliana Elsa, Kashadi, Siti Malikhatun Badriah, “Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang)”, *Diponegoro Law*, (Semarang, Tahun 2016), hlm. 11.

¹¹⁷ Ariyanto, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Jayapura”, *Legal Pluralism*(Volume 3 Nomor 1, Januari 2013), 73.

¹¹⁸Viola Agnesia, Selaku Kepala Pendukung Pemasaran PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang, *Wawancara*, Semarang 17 Januari 2020.

FIFGROUP menghubungi debitur dan penanggung jawab melalui telepon untuk mengkonfirmasi keterlambatan pembayaran angsuran.

3. Jika sampai 2 kali telat angsuran dan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal ini melakukan pembayaran angsuran, PT. FIFGROUP mengeluarkan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada debitur .
4. Jika debitur tidak mengindahkan surat peringatan pertama tersebut, maka PT. FIFGROUP kembali mengeluarkan surat peringatan kedua yang ditujukan kepada debitur.
5. Apabila debitur tidak merespon surat peringatan pertama dan kedua, maka PT. FIFGROUP melalui kepala pendukung pemasaran mengeluarkan surat penarikan kendaraan.
6. *Collector internal* mendatangi rumah debitur dan melakukan penarikan. *Collector internal* bertugas untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor yang diberi surat kuasa resmi yang telah ditandatangani oleh direksi serta berstempel PT. FIFGROUP. Surat kuasa merupakan dasar hukum yang sah bagi kreditur dalam penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun sebelum melakukan penyitaan pihak PT. FIFGROUP menyiapkan surat-surat yang harus dibawa pada pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor, meliputi:
 - a. Surat penarikan kendaraan yang ditandatangani oleh Direksi
 - b. Fotokopi perjanjian pembiayaan
 - c. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia
 - d. Catatan histori pembayaran
 - e. Surat kuasa untuk melakukan penarikan atau penyitaan objek jaminan fidusia
7. Apabila menunjukkan kalau terdapat debitur yang terbukti menjual bahkan menggadaikan objek jaminan fidusia maka dilakukan musyawarah terlebih dahulu yaitu pihak PT. FIFGROUP akan meminta debitur untuk memberitahukan sepeda motor tersebut dimana

keberadaannya dan meminta debitur untuk membantu melakukan pencarian dan memberi tenggang waktu 3 hari. Sampai pada akhirnya jika diwaktu yang sudah ditentukan tetap kendaraan tersebut tidak ditemukan dan tidak ada iktikad baik dari debitur, barulah pihak PT. FIFGROUP melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai konsekuensi apabila memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari kreditur maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanakan sebagaimana ketentuan Pasal 36 UUJF yang menentukan. Debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis perwakilan dari Departemen Litigasi PT. FIFGROUP yang dilakukan dilapangan dalam penyelesaian kasus pemindahtanganan jaminan fidusia yang dilakukan debitur tanpa sepengetahuan PT. FIFGROUP ialah *Remedial Field*¹¹⁹ dan *Dept Collector (DC)*¹²⁰ menerima penugasan dari dibekali dengan berkas sebagai berikut :¹²¹

- a. Dokumen primer meliputi Surat Tugas atau Surat Kuasa Penarikan Kembali untuk *Dept Collector(DC)* dan Surat Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ)

¹¹⁹*Remedial Field* ialah karyawan lapangan dari perusahaan yang mempunyai tugas menagih konsumen dengan penangan 30 hari sampai 60 hari keterlambatan bayar konsumen. <http://menujuhukum.blogspot.com/2016/03/mendalami-pekerjaan-kolektor.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 23.43.

¹²⁰*Dept Collector (DC)* ialah orang yang bertugas mencari unit di lapangan, mengamankan unit dilapangan, menyerahkan unit kepada leasing yang berhak. <http://menujuhukum.blogspot.com/2016/03/mendalami-pekerjaan-kolektor.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 23.44.

¹²¹Kepala Departemen Litigasi Di PT. Federal International Finance , *Wawancara*, Semarang 30 Januari 2020.

- b. Dokumen optional adalah dokumen yang diadakan untuk mendukung kelancaran kerja *Remedial Field*, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, antara lain :
1. Copy kontrak (Perjanjian Pemberian Konsumen, Perjanjian Pejanjian Pemberian Jaminan Fidusia);
 2. Data Jadwal pembayaran angsuran;
 3. Data motor dan Penerima fasilitas;
 4. Daftar kunjungan *Remedial field*.

Setelah menerima surat tugas/surat kuasa, dokumen primer dan optional, *Remedial field* atau *DC* langsung mendatangi alamat yang ada dalam data motor untuk mengambil kembali barang jaminan. Pada saat penarikan jika barang jaminan ada maka langsung diambil dan dibawa ke Kantor PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang (jika dalam area kerja PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang), sedangkan apabila barang jaminan tidak ada atau sudah dialihkan maka *Remedial field* atau *DC* akan meminta penerima fasilitas menjelaskan kenapa barang jaminan dialihkan, meminta dan melibatkan penerima fasilitas menunjuk kemana barang jaminan dialihkan untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan barang jaminan tersebut.¹²²Selain dari karyawan lapangan *Remedial Field* PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang bekerjasama dengan pihak luar untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut bentuknya adalah memberikan kuasa kepada jasa mata elang (kolektor yang bekerja pada lembaga khusus melakukan kerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen) untuk mengambil dan/atau menyelesaikan penanganan khusus penyitaan unit ditempat.

Pada kenyataan di lapangan PT. FIFGROUP melakukan penyelesaian kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur dengan cara penarikan paksa.

Dari keterangan para informan di atas, pada umumnya debitur tidak tahu jika pemindahtanganan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan PT. FIFGROUP tidak boleh dilakukan, jikalau pun mengetahui debitur tidak dapat

¹²² Ibid.

melakukan karena memikirkan bunga yang bertambah jika dilakukan fidusia ulang.

Adapun jika didalilkan oleh pihak *Remedial Field* upaya penarikan paksa akan digunakan apabila penyelesaian secara prosedural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tidak dapat digunakan dan menjadi cara terakhir. Perusahaan melakukan penyitaan ini dapat disamakan dengan parate eksekusi dengan alasan bahwa dengan model seperti diatas lebih sederhana karena melewati proses yang tidak serumit dengan hukum beracara di Pengadilan. Relatif efektif dan efisien dalam waktu dan biaya karena bisa dilakukan secara kekeluargaan tanpa menggunakan tenaga pengacara dan dokumen yang dipersiapkan tidak harus bermacam-macam. Pihak perusahaan telah melakukan tindakan preventif dengan melampirkan surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh debitur sendiri pada saat melakukan perjanjian sebelumnya. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia) semuanya merupakan bukti yang mengikat bagi kedua belah pihak dan memuat perihal penarikan hingga penjualan di muka umum yang telah ditanda tangani oleh debitur sendiri. Sehingga jalur pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan penyelesai kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia ke tangan orang lain secara melawan hukum.¹²³

Tabel 4.1 Ketentuan Undang-Undang dan Implikasi Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia

No	Pengaturan Penyelesaian Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia	Pelaksanaan di PT. FIFGROUP
1	Cara eksekusi dengan melaksanakan titel eksekutorial dan Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia (Pasal 29 ayat (1) UUJF)	Pasal tersebut yang mendasari pengambilan secara paksa oleh DC dari dipah FIFGROUP dengan alasan bahwa

¹²³Violla Agnesia, Selaku Kepala Pendukung Pemasaran PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang, *Wawancara*, Semarang 17 Januari 2020.

		<p>pihak penerima Fidusia tidak mengindahkan lagi peringatan dari pihak FIFGROUP sehingga upaya pengambilan secara paksa menjadi pilihan terbaik yang dapat dilakukan.</p>
2	<p>Mahkamah mewajibkan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak diserahkan secara sukarela oleh debitur mesti mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)</p>	<p>Berdasarkan penelitian di PT. FIFGROUP kelima perkara diatas terjadi sebelum adanya putusan tersebut maka berlakunya asas hukum legalitas. Jadi sudah sesuai dengan SOP penarikan. Akan tetapi menurut pengakuan dari ke-lima narasumber yang penulis lakukan penggalan data, ternyata pengambilan atau penarikan Objek Jaminan Fidusia tanpa musyawarah sama sekali, dengan tindakan arogan merampas secara paksa, bahkan penarikannya di tengah jalan.</p>
3	<p>Pasal 11 Angka 11.2 Perjanjian Pembiayaan. Mengenai segala perselisihan, pertentangan, atau tuntutan yang lahir dari Perjanjian ini, kecuali bila dapat diselesaikan secara musyawarah, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dimana jasa layanan diberikan</p>	<p>Dalam prakteknya banyak terjadi perampasan-perampasan kendaraan kredit bermasalah oleh <i>Debt Collector</i> yang</p>

	<p> kreditur.</p>	<p> mana eksekusi tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga eksekusi itu dianggap cacat hukum.</p>
--	-------------------	---

Sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan cara-cara eksekusi secara paksa oleh PT. FIFGROUP dapat menimbulkan implikasi hukum yang baru jika debitur keberatan dan mengadukan PT. FIFGROUP dengan pasal-pasal pidana antara lain perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan perampasan. Melihat dampak kredit bermasalah di PT. FIFGROUP yang berpengaruh sedemikian besar terhadap penghasilan dan keuntungan PT. FIFGROUP, maka setiap adanya gejala yang mensyaratkan adanya kredit bermasalah harus segera ditangani dan diselesaikan menggunakan jalur musyawarah atau pengadilan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya, baik kasus pertama hingga kelima terjadi karena ketidaktahuan dari pihak pemberi fidusia, bahwa melakukan pemindahtanganan harus seizin tertulis kepada penerima Fidusia dalam hal ini PT. FIFGROUP. Sehingga yang dilakukan oleh penerima fidusia merupakan sebuah tindakan yang berakibat hukum, yakni Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menjeratnya ke Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya apabila pihak penerima fidusia melakukan tindakan Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi:¹²⁴

“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

¹²⁴ Ariyanto, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Jayapura”, *Legal Pluralism*(Volume 3 Nomor 1, Januari 2013), 73.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Pasal tersebut yang mendasari pengambilan secara paksa oleh DC dari dipah FIFGROUP dengan alasan bahwa pihak penerima Fidusia tidak mengindahkan lagi peringatan dari pihak FIFGROUP sehingga upaya pengambilan secara paksa menjadi pilihan terbaik yang dapat dilakukan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang mana menjelaskan bahwa perusahaan leasing tidak dapat semerta-merta menarik Objek Jaminan Fidusia secara paksa atau sepihak tanpa adanya pengakuan dari debitur perihal wanprestasi. Peraturan tersebut berlaku bagi perkara-perkara yang terjadi setelah tanggal dikeluarkannya putusan. Ke-lima perkara diatas terjadi sebelum adanya putusan tersebut maka berlakunya asas hukum legalitas. Jadi sudah sesuai dengan SOP penarikan. Akan tetapi menurut pengakuan dari ke-lima narasumber yang penulis lakukan penggalan data, ternyata pengambilan atau penarikan Objek Jaminan Fidusia tanpa musyawarah sama sekali, dengan tindakan arogan merampas secara paksa, bahkan penarikannya di tengah jalan.

Padahal jika melihat kembali peraturan nomor 7 sesuai dengan SOP perusahaan seharusnya tidak akan pernah dijumpai permasalahan seperti yang disebutkan diatas. Yakni Apabila menunjukkan kalau terdapat debitur yang terbukti menjual bahkan menggadaikan objek jaminan fidusia maka dilakukan musyawarah terlebih dahulu yaitu pihak PT. FIFGROUP akan meminta debitur untuk memberitahukan sepeda motor tersebut dimana keberadaannya dan meminta debitur untuk membantu melakukan pencarian dan memberi tenggang waktu 3 hari. Akan tetapi pada kenyataannya DC tidak pernah melakukan hal tersebut, justru seringkali melakukan tindakan-tindakan represif dari pengancaman dan kekerasan verbal terhadap debitur.

Dari pembahasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwasannya praktik penyelesaian pemindahtanganan yang dilakukan oleh PT. FIFGROUP tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain daripada

itu pekerja lapangan yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugasnya seringkali tidak mengindahkan hak-hak konsumen serta menunjukkan sikap arogansinya.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Debitur melakukan Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia secara Melawan Hukum

Tanggung jawab debitur terhadap pemindahtanganan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan PT. FIFGROUP(kreditur) ialah dampak dari peristiwa yang terjadi, bisa berupa tanggung jawab secara perdata maupun pidana. Debitur tidak dibenarkan menjadi pemilik sepenuhnya atas objek jaminan fidusia tersebut, hanyalah kreditur yang berwenang atas objek jaminan fidusia karena kreditur memiliki hak kepemilikan sedangkan benda jaminan dikuasai oleh debitur. Konsekuensi hukum jika terjadi permasalahan karena kesalahan kesengajaan atau lalai dari debitur yang berhubungan dengan objek jaminan fidusia, maka kreditur dibebaskan tanggung jawab dan debitur yang bertanggung jawab penuh. Hal tersebut telah ditegaskan didalam Pasal 24 UUF yang berbunyi:

“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Pemindahtanganan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya tanpa persetujuan kreditur, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena perbuatan pengalihan tersebut bawa kerugian kepada kreditur karena objek jaminan fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga debitur dapat menuntut debitur untuk ganti rugi dan segera melunasi sisa hutangnya.¹²⁵ Pasal 1365 KUHPdata menjelaskan:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti rugi”.

¹²⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Paramita, 2003, hlm. 346.

Pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur, tidak menghapus kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Walaupun objek jaminan sudah di pindahtangankan ke orang lain, debitur yang berutang kepada kreditur yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan. Berbeda halnya jika pemindahtanganan diajukan secara sah, maka yang berkewajiban membayar adalah debitur yang baru. Akibat pemindahtanganan yang dilakukan debitur tanpa persetujuan kreditur dapat dituntut melalui pelanggaran perdata maupun pidana. Kerugian materi sudah jelas yang dialami kreditur telah rugi sebesar jaminan yang difidusiakan ditambah bunga yang sudah disepakati kedua belah pihak. Akibat kerugian tersebut tentunya ia dapat meminta kembali atau menarik kembali dari debitur yang telah merugikan itu.

Seperti halnya contoh dari 2 perkara diatas, keduanya melakukan pemindahtanganan tanpa sepengetahuan dari pihak Penerima Fidusia / Kreditur. Dalam hal ini jelas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, akan tetapi keduanya bertanggungjawab untuk kembali membayar angsuran baik pokok, bunga, maupun denda keterlambatan yang disebabkan karena perkara sebelumnya.

Perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak kreditur tidak dapat diakui kreditur. Janji-janji (prestasi) antara kreditur dan debitur tetap mengacu pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani pada awal pencairan kredit. Segala bentuk pertanggungjawaban atas pelunasan kredit pada kreditur tidak dapat dialihkan secara bawah tangan. Debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan fasilitas kredit. Apabila debitur tidak bersedia melakukan pemenuhan tanggung jawab tersebut, kreditur memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam melakukan penagihan, baik terhadap obyek jaminan maupun seluruh harta debitur. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan pengalihan secara bawah tangan didapatkan kemungkinan debitur tidak menguasai obyek jaminan. Dalam kondisi demikian, kreditur tetap memiliki hak mengeksekusi jaminan fidusia.

Lembaga pembiayaan konsumen yang mendaftarkan objek jaminan fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat inilah yang akan dijadikan bukti kepemilikan oleh kreditur bahwa ia merupakan pemilik benda jaminan yang dijaminan oleh debitur, walaupun benda jaminan tersebut berada dalam penguasaan debitur. Dalam hal objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur sehingga pada saat di lakukan eksekusi objek jaminan tidak ditemukan pada debitur maka debitur harus bertanggungjawab atas hilangnya objek jaminan tersebut. Berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan selaku kreditur maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian atas objek jaminan tersebut. Debitur harus bertanggungjawab untuk melunasi segala hutang-hutangnya kepada kreditur. Kreditur sebagai penerima fidusia tidak ikut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh debitur . Hal ini dijelaskam dalam Pasal 24 UUF yang menentukan bahwa:

“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Debitur baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang melakukan pemindahtanganan objek jaminan fidusia secara melawan hukum di PT. FIFGROUP bahwasanya debitur telah mendapat fasilitas kredit pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor sebagaimana terdapat dalam perjanjian pembiayaan. Jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku kantor Pendaftaran Fidusia dan telah diterbitkan sertifikat fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari kepastian hukum, artinya dengan dilakukannya pendaftaran maka apabila terjadi peralihan seperti yang terjadi pada kasus diatas, kreditur pemegang jaminan fidusia dapat dilindungi berdasarkan Asas *Droit de Suite*.¹²⁶ Pemberian sifat hak kebendaan dimaksudkan untuk

¹²⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak yang Memberi Kenikmatan)*, Jakarta: Ind-Hill Co, Vol.I, 2005, hlm. 52. Asas *Droit de Suite* ialah suatu hak tanggungan terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun.

memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan, dengan memberikan sifat *droit* pada fidusia, maka hak kreditur tetap mengikuti bendanya kepada siapapun ia berpindah, termasuk jika jaminan fidusia sudah di tangan orang lain.¹²⁷

Kasus yang terjadi di PT. FIFGROUP beserta dengan debitur terdapat dua perbuatan hukum yaitu debitur awal mulanya tidak membayar angsuran kredit sepeda motor, perbuatan ini termasuk perbuatan wanprestasi dan setelah ditelusuri ternyata terdapat beberapa debitur yang memindahtangankan kendaraan bermotor ke tangan orang lain tanpa persetujuan PT. FIFGROUP, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Debitur tidak mengangsur 1 unit kendaraan bermotor yang menjadi kewajibannya karena kendaraan bermotor sudah tidak ada ditangannya akibat dipindahtangankan ke orang lain tanpa persetujuan PT. FIFGROUP melanggar Pasal 1365 KUHPerdata dimana tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:¹²⁸

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

Menurut penulis unsur-unsur yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam kasus yang diteliti ialah:

Pertama, Perbuatan itu harus melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan itu harus melawan hukum, baik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana yang seharusnya ia lakukan. Perbuatan yang

¹²⁷Ibid. 52.

¹²⁸ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm.22.

dilakukan oleh debitur terhadap PT. FIFGROUPialah melawan hukum karena melanggar UUJF maupun Perjanjian pembiayaan yang dibuat dan disetujui kedua belah pihak. Pemindahtanganan objek jaminan fidusia ketangan orang lain tanpa persetujuan PT. FIFGROUPialah melanggar Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi:

“Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Serta melanggar Perjanjian Pembiayaan yang terdapat pada Pasal 7 point 7.2 yang mengatakan bahwa:

“Selama berlangsungnya Perjanjian atau selama Hutang belum lunas, DEBITUR dilarang mengalihkan penguasaan, menyewakan, menggadaikan / menjaminkan, memindahtangankan / menjual atas Kendaraan dan/atau bagian dari Kendaraan kepada pihak lain atau melakukan hal yang membahayakan / merugikan kepentingan KREDITUR, dan dilarang melakukan / mengadakan penambahan / pengurangan / perubahan-perubahan baik bentuk, pemesinan, fungsi atas Kendaraan, kecuali bila ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITUR”

Kedua, Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Perbuatan yang dilakukan debitur dalam pemindahtanganan objek jaminan fidusia ketangan orang tanpa persetujuan kreditur tentu telah merugikan PT. FIFGROUP sebesar barang yang dijaminkan serta bunga yang harus didapat PT. FIFGROUP.

Ketiga, Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan. Perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum. Dalam hal ini debitur sengaja memindahtangankan objek jaminan fidusia ke tangan orang lain tanpa persetujuan PT. FIFGROUP.

Keempat, Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal. Hubungan kausal yang terjadi ialah karena kesalahan yang diperbuat oleh debitur sehingga merugikan pihak kreditur. Oleh karena itu, kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan para debitur yang memindahtangankan jaminan fidusia berupa sepeda motor ketangan orang lain, yang mengakibatkan PT.

FIFGROUP mengalami kerugian sebesar objek jaminan yang difidusiakan dan bunga yang harusnya diperoleh, serta kerugian immaterill dimana akibat perbuatan tersebut telah membuat nama baik PT. FIFGROUP terhadap kepercayaan masyarakat menjadi tercemar.

Para debitur telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatannya debitur harus bertanggung jawab mengembalikan objek jaminan fidusia. Tanggung jawab debitur ialah mengganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para debitur. Ganti rugi tersebut merupakan pemulihan keadaan seperti semulasebelum terjadinya perbuatan yang melawan hukum.

Sedangkan pada 3 perkara lainnya, ketiganya tidak melakukan sebagaimana mestinya pertanggungjawaban seperti dua kasus lainnya, mereka merelakan Objek jaminan Fidusia ditarik kembali oleh perusahaan *leasing*. Jika dilihat dari Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Sehingga mereka wajib melakukan pertanggungjawaban.

Adapun dengan mengembalikan serta merelakan sepeda motor yang merupakan jaminan fidusia menurut penulis dapat memecahkan permasalahan jika debitur melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada dasarnya konsekuensi terhadap perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi berupa pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya perbuatan yang melawan hukum tersebut. Karena pada dasarnya hasil dari sitaan objek jaminan fidusia akan dilakukan pelelangan, yang nantinya hasil dari pelelangan tersebut digunakan sebagai biaya penutup kerugian yang diderita oleh PT. FIFGROUP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penyelesaian kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia oleh debitur ke tangan orang lain secara melawan hukum di PT. FIFGROUP Cabang Kota Semarang, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Bahwasannya praktik pemindahan yang dilakukan oleh debitur sebenarnya dibenarkan oleh undang-undang, asalkan mendapatkan izin tertulis dari PT. FIFGROUP. Akan tetapi pada kenyataannya tanpa perizinan, debitur melakukan perpindahan, sehingga perbuatannya mengakibatkan akibat hukum yakni Perbuatan Melawan Hukum. Perpindahantangan melalui Peralihan. Penjualan, baik penyewaan yang dilakukan oleh pihak debitur apabila sebelum pelaksanaannya izin terlebih dahulu maka dapat dibenarkan secara Undang-Undang. Sedangkan motif yang mendasari hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang menjadikan ketidaksanggupan melanjutkan angsuran.
2. Penyelesaian yang dilakukan oleh baik kreditur dengan debitur mengenai permasalahan yang muncul terkait pemindahantangan objek jaminan yang dilakukan oleh debitur merupakan sebuah tindakan yang salah, dalam 5 perkara yang penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa 2 (dua) dari 5 menyatakan siap bertanggungjawab dengan melanjutkan sisa angsuran dan membayar denda keterlambatan, sedangkan 3 (tiga) sisanya menyatakan ketidaksanggupan bertanggungjawab sehingga harus mengembalikan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Disisi lain PT.FIFGROUP dengan cara melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dibenarkan menurut Undang-Undang, hal tersebut diatur didalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Fidusia sebelum tanggal 6 Januari 2020, setelah tanggal tersebut sesuai putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang mana menjelaskan bahwa perusahaan leasing tidak dapat semerta-merta menarik Objek Jaminan Fidusia secara paksa

atau sepihak tanpa adanya pengakuan dari debitur perihal wanprestasi. Akan tetapi praktik perlakuan yang dilakukan oleh pelaksana lapangan dalam hal ini DC, tidak sesuai dengan prosedur perusahaan, tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, DC sering melakukan praktik-praktik menyimpang dengan cara merebut paksa, hingga kekerasan verbal kasar yang sering dilontarkan kepada Debitur .

B. Saran

Rekomendasi penulis berkaitan dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah:

1. Penulis memandang perlu adanya evaluasi terkait penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. FIFGROUP melalui *Dept Collector* sebagai eksekutor lapangan, dengan menyesuaikan putusan MK terbaru terkait hak eksekutorial Kreditur. Dengan berpedoman pada putusan MK yang Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang mana menjelaskan bahwa perusahaan leasing tidak dapat semerta-merta menarik Objek Jaminan Fidusia secara paksa atau sepihak tanpa adanya pengakuan dari debitur perihal wanprestasi. Sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak.
2. Perlu adanya edukasi terhadap penyelesai lapangan (DC) dalam hal etika interaksi dengan Klien, pada dasarnya dari ke-lima narasumber debitur yang penulis lakukan wawancara, ke-limanya mengeluh bahwa perlakuan *Dept Collector* selalu bertindak represif dalam upaya penyelesaian ini, sehingga menimbulkan efek traumatic terhadap Klien.
3. Perlu adanya pemahaman ulang mengenai SOP point ke 7 yakni melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum adanya penarikan secara paksa, point ke 7 ini jarang sekali dilakukan, sehingga dalam praktiknya debitur sering kali seperti diawasi oleh mata elang, dan buktinya terjadi penarikan secara paksa di tengah jalan atau saat motor itu sedang digunakan. Hal ini jelas mengganggu bagi Klien serta berkemungkinan membahayakan lalu lintas.

4. Perlu adanya kesadaran bagi debitur yang melakukan perjanjian konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih bertanggungjawab dan apabila tidak mampu membayar angsuran dan ingin dipindahtangankan hendaknya memberitahukan kepada PT.FIFGROUP Cabang Kota Semarang agar apabila terjadi eksekusi kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2006.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2002.

_____. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1989.

I.S. Adiwinata, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2002.

_____. *Janji-Janji Dalam Akta Hipotek Dan Hak Tanggungan*, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2002.

Kamello, H Tan. *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, Cetakan ke-2, Bandung: PT Alumni, 2006.

_____. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara., Disertasi*, Medan: PPs-USU, 2002.

Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Moeleong, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Munir, Fuadi. *Jaminan Fudisia Revisi Kedua*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.

- _____. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002a.
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002b.
- _____. *Jaminan Fidusia, Cet. 2*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002c.
- Murniati, Abdulkadir Muhammad dan Rilda. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasihin, Miranda. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Buku Pintar, 2012.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007.
- Satrio, J. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Shidarta, dan Sukistyowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Sidoharjo: CV. Mitra Media, 2003.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Sofwan, Sri Soedewi Maschoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1997.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-XXXIII, Jakarta: PT. Intermedia, 2005

_____. *Hukum Perjanjian*, Cet VI, Jakarta: Intermasa, 1979.

Suryatin, R. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Tjitrosudibo, dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Paramita, 2003.

Tiong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur Perikatan*, Jakarta: Galia Indonesia, 1984.

Usman, Rahmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2015.

Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Surabaya: Media Nusa Creative, 2011.

JURNAL/SKRIPSI

Saptono, Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, dan Hendro. “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet(Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridi”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, 2017.

Ariyanto, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Jayapura”, *Legal Pluralism*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2013.

Badriah, Auliana Elsa, Kashadi, dan Siti Malikhatun “Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang)”, *Diponegoro Law*, Semarang, 2016.

Faturahman, Ali Maskur. “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dan Dampaknya Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dan Pembiayaan Konsumen Di BPR Bhumikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta.

Hasbullah, Frieda Husni. “*Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak yang Memberi Kenikmatan)*”, Jakarta: Ind-Hill Co, Vol.I, 2005.

Putra, Muhammad Rio Erwandra. “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta”, *Jurnal Privat Law*, Volume v, Nomor 1, 2017.

Wibowo, RM. Leonard Charter Wahyu. “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”, *Tesis*, Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.

_____. “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Nelson Abednego Situmeang, Herdi Kuingo, Moestar Arifin, “Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2019.

Internet

<https://www.kumham-jogja.info/pelayanan-publik/pelayanan-hukum-umum/fidusia> diakses 16 Oktober 2019.

<https://www.fifgroup.co.id>.

<https://resources.urbanhire.com/credit-analyst>. diakses pada tanggal 29 Januari 2020, pukul 20.00 WIB.

<http://ekonomikaya.blogspot.com/2017/04/tanggung-jawab-dan-tugas-cmo-credit.html>. diakses pada tanggal 18 Januari 2020, Pukul 13.52 WIB.

<http://menujuhukum.blogspot.com/2016/03/mendalami-pekerjaan-kolektor.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 23.43.

<https://catatandebtcollector.wordpress.com/2013/03/20/collector-menurut-level-tugasnya/> diakses pada tanggal 23 Februari 2020. Pukul 11.28.

<http://menujuhukum.blogspot.com/2016/03/mendalami-pekerjaan-kolektor.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 23.44.

Dokumen

Dokumen prospectus PT. Federal International Finance Tahun 2018.

Surat Perjanjian Pembiayaan PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang.

Data motor dan Penerima Fasilitas yang Bermasalah PT. Federal International Finance 2017-2019

Document prospectus PT. Federal International Finance Tahun 2016.

Dokumen Laporan Tahunan PT. Federal International Finance 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto



Lampiran : Biodata Diri

Nama : Humairo Khaerun Nida

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 22 Oktober 1996

Alamat Asal : Wonokromo RT 01/RW 01 Mojotengah Kab.
Wonosobo Jawa Tengah

Alamat Domisili : Jalan Lawas Duwet, Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

2. SD Negeri 2 Wonosobo	Tahun Lulus 2009
3. SMP Negeri 30 Semarang	Tahun Lulus 2012
4. SMA Negeri 1 Mojotengah Wonosobo	Tahun Lulus 2015
5. Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo	Tahun 2015 s.d sekarang

Motivasi Hidup : Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah. Jika tak bisa, maka
ubahlah cara pandangmu tentangnya. – Maya Angelou

Media Komunikasi :

1. 085875660448 (*Whatsapp*)
2. khaerunnidahumairo@gmail.com (*email*)

Semarang, 7 April 2020

Humairo Khaerun Nida
NIM. 1502056036